

**PANEL PENASIHAT INDEPENDEN
TANGGUH**
*(TANGGUH INDEPENDENT ADVISORY PANEL –
TIAP)*

**LAPORAN TENTANG
PENGOPERASIAN
PROYEK LNG TANGGUH**

OKTOBER 2012

DAFTAR ISI

I.	Kata Pengantar	1
II.	Perkembangan Terkini dan Ikhtisar	5
III.	Perkembangan Politik dan Keamanan	10
IV.	Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Tangguh	15
V.	Hubungan Pemerintah dan Masyarakat	20
VI.	Program untuk DAV dan Teluk Bintuni	25
VII.	Ketenagakerjaan dan Pelatihan Penduduk Asli Papuan	34
VIII.	Tata Kelola dan Transparansi	38
IX.	Manajemen Pendapatan	42
X.	Lingkungan	47
XI.	Ekspansi Tangguh	50

SINGKATAN DAN ISTILAH

<i>adat</i>	Kebiasaan, hukum dan sistem penyelesaian pertikaian secara lokal dan tradisional yang banyak digunakan di Indonesia
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ADB	Bank Pembangunan Asia
BBDF	Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni
BPMIGAS	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas – lembaga pemerintah Indonesia yang merupakan regulator dalam Proyek Tangguh
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Brimob	Brigade Mobil
<i>Bupati</i>	Kepala daerah kabupaten
CAP	Rencana Aksi Masyarakat – program dukungan untuk memfasilitasi proyek pembangunan berbasis masyarakat di desa-desa yang terkena dampak langsung
DAV	Desa yang sejak awal diidentifikasi sebagai daerah yang terkena dampak langsung proyek Tangguh
Dinas	Dinas
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EITI	Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif
GOI	Pemerintah Indonesia
ICBS	Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat
ICITAP	Kantor Program Pendampingan Pelatihan Investigasi Internasional di bawah Departemen Kehakiman AS
IPB	Institut Pertanian Bogor
ISP	Program Sosial Terpadu – unit pelaksana dalam lingkungan proyek Tangguh dan program pengembangan sosial ekonomi yang dikelola oleh unit tersebut
JUKLAP	Petunjuk Lapangan
JUKLAP/PAMBERS	Petunjuk Lapangan Pengamanan Bersama - pembaruan dan perpanjangan kesepakatan JUKLAP di tahun 2009

kabupaten	Distrik atau kabupaten
Kapolda	Kepala Kepolisian Daerah
Kapolres	Kepala Kepolisian Resor
Kota	Kota
LARAP	Rencana Kerja Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali – rencana kerja pemukiman kembali Proyek Tangguh yang menggambarkan dampak pemukiman kembali di luar kemauan sendiri
LNG	Gas alam cair
MCC	Media Cipta Citra
MOU	Nota kesepahaman
MRP	Majelis Rakyat Papua – badan perwakilan yang terdiri dari pimpinan agama, adat, dan perempuan, yang dibentuk berdasarkan UU Otonomi Khusus
NGO	Lembaga Swadaya Masyarakat
OECD	Organisasi bagi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan
OPM	Organisasi Papua Merdeka – organisasi separatis
Otsus	Otonomi Khusus
Pangdam	Panglima Komando Daerah Militer
Perdasus	Peraturan daerah khusus yang menentukan alokasi bagi hasil sumber daya alam Otonomi Khusus
POB	People on Board - jumlah pekerja di sebuah fasilitas pada satu waktu tertentu
Proper	Program audit nasional Kementerian Lingkungan Hidup
UGM	Universitas Gadjah Mada
RAV	Desa yang terkena dampak pemukiman kembali yang memang teridentifikasi oleh Proyek Tangguh – Tanah Merah Baru, Saengga, dan Onar
SBY	Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono
SKJ	Surat Keterangan Jalan
SOP	Standar prosedur operasional
THCU	Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh

TIAP	Panel Penasihat Independen Tangguh (<i>Tangguh Independent Advisory Panel</i>)
TNI	Tentara Nasional Indonesia
UNIPA	Universitas Negeri Papua
UP4B	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
YSA	Yayasan Sosial Augustinus – yayasan lokal

I. Pendahuluan

Panel Penasihat Independen Tangguh (“TIAP”) dibentuk untuk memberikan saran secara eksternal kepada para pengambil keputusan senior di BP, berkenaan aspek non komersial Proyek LNG Tangguh dengan tujuan khusus memberikan saran kepada BP tentang bagaimana Tangguh dapat mewujudkan potensinya sebagai model pembangunan kelas dunia. Panel saat ini diketuai mantan Senator Amerika Serikat Tom Daschle, yang pernah menjabat sebagai Pemimpin Mayoritas Senat AS, serta beranggotakan antara lain Augustinus Rumansara, warga Papua yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Panel Penilai Kepatuhan di Bank Pembangunan Asia (“Asian Development Bank”) dari tahun 2003 hingga 2008, Penasihat Gubernur Papua dari tahun 2008 sampai dengan 2010 serta saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Pembangunan Rendah Karbon Papua (the Papua Low Carbon Development Task Force).¹ Panel dibantu oleh penasehat independen dan memiliki sekretariat di firma hukum DLA Piper yang dikepalai oleh Gary Klein selaku mitra senior. Panel terdahulu, yang memantau fase pembangunan kilang, diketuai oleh mantan Pimpinan Mayoritas Senat AS George Mitchell serta beranggotakan antara lain Lord Hannay of Chiswick, Duta Besar Sabam Siagian dan Pendeta Herman Saud. Panel yang saat ini bertugas dibentuk pada tahun 2009 dan akan menjabat hingga tahun 2014, serta dirancang untuk memantau kegiatan BP pada awal fase operasional. Ini adalah laporan lengkap pertama yang dihasilkan Panel kedua. Laporan ini akan tersedia di situs web BP², sama seperti laporan TIAP terdahulu bersamaan dengan tanggapan BP.

¹ Untuk keperluan laporan ini, istilah “Papua” mengacu pada kawasan yang mencakup baik Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat. Istilah “Provinsi Papua” mengacu pada Provinsi Papua setelah pemekaran Provinsi Papua Barat. Istilah “Papua Barat” mengacu pada provinsi Papua Barat (sebelumnya disebut Irian Jaya Barat) setelah dibentuk pada tahun 2004. Peta Papua yang menunjukkan lokasi-lokasi penting terkait dengan Proyek Tangguh ada dalam Apendiks 1.

² Lihat <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004751&contentId=7008791>

Disamping pengawasan oleh TIAP, Grup Pemberi Pinjaman Tangguh (diwakili oleh ADB, Japan Bank for International Cooperation dan Mizuho Corporate Bank) telah membentuk panel eksternal beranggotakan pakar independen yang rutin mengunjungi Tangguh dan mempublikasikan hasil penilaian mereka di situs web ADB. Penilaian mereka terbatas pada isu keselamatan, lingkungan pemukiman kembali (resettlement), dan program-program sosial. Sebagai bentuk pengakuan atas hasil kerja Grup Pemberi Pinjaman untuk Proyek Tangguh dan perbedaan isu yang muncul antara konstruksi dan operasi, serta untuk menghindari kesamaan dan duplikasi laporan, TIAP akan fokus memberikan saran kepada BP terkait aspek-aspek nonkomersial Tangguh. Karena itulah TIAP akan memfokuskan perhatiannya pada hal-hal terkait keamanan, hak asasi manusia, tata kelola pemerintahan, pengelolaan pendapatan, iklim politik dan isu-isu lebih luas lainnya mengenai dampak Tangguh terhadap masyarakat Papua dan persepsi mereka terhadap Proyek. Persepsi-persepsi ini sangat berkaitan dengan kemampuan Tangguh untuk menjadi model pembangunan kelas dunia.

Di bulan Juli 2012, TIAP mengunjungi Biak, Manokwari dan Teluk Bintuni di Papua, serta Jogjakarta dan Jakarta. Panel menemui Menteri, pejabat pemerintah dan LSM, Pangdam Papua, Kapolda Papua, Rektor Universitas Papua (“UNIPA”), tim Universitas Gadjah Mada (“UGM”) yang menangani isu-isu tata kelola pemerintahan dan manajemen pendapatan, serta perwakilan Kedutaan Amerika Serikat dan Inggris.³ TIAP menghabiskan beberapa hari di Kabupaten Teluk Bintuni, menemui Bupati dan beberapa kepala kabupaten dan desa lain, penduduk dari desa di pesisir utara dan selatan, karyawan Papua terampil di Tangguh, serta personel BP yang menjalankan manajemen, kegiatan operasional, pengembangan penduduk asli Papua dan operasi keamanan di kilang LNG. Sayangnya Panel tidak mengunjungi Jayapura

³ Lihat Apendiks II untuk daftar lengkap pemangku kepentingan utama yang diajak berkonsultasi oleh TIAP.

karena masalah keamanan terkait kasus penembakan di dan sekitar kota tersebut.⁴ Untungnya Panel dapat bertemu dengan pihak-pihak yang bertugas di Jayapura termasuk Pangdam, Kapolda, LSM dan perwakilan pejabat Gubernur, di lokasi lain.

Panel melakukan penilaian terhadap program-program dan kegiatan BP terkait norma-norma global yang paling dipatuhi dan berlaku saat ini, yang mengembangkan praktik-praktik terbaik untuk berbagai proyek di negara-negara berkembang. Hal ini mencakup Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia; Norma PBB Tentang Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dan Perusahaan Bisnis Lainnya Terhadap HAM; Panduan OECD Bagi Perusahaan Multinasional; Konvensi Organisasi Buruh Internasional Mengenai Penduduk Asli dan Suku-Suku di Negara Merdeka; Petunjuk Operasional Bank Dunia berkenaan dengan penduduk asli; dan Prinsip-Prinsip Keamanan dan HAM dari AS-Inggris (Prinsip-Prinsip Kesukarelaan).

Panel tidak melakukan penilaian mengenai kepatuhan BP terhadap kebijakan nasional dan lokal di Indonesia, tetapi mengkaji kewajiban BP terhadap AMDAL (yang mengatur kewajiban sosial dan lingkungan).⁵ Panel memperoleh akses lengkap ke seluruh informasi yang diminta serta kebebasan penuh dalam melakukan penyelidikan dan menyampaikan temuannya. Kesimpulan dan rekomendasi dalam laporan ini semuanya murni berasal dari Panel. Panel mengharapkan BP menyampaikan tanggapan terhadap tiap rekomendasi Panel dan mengantisipasi diadakannya pertemuan terbuka dengan pihak terkait untuk membahas laporan ini dan tanggapan BP di London, Washington, D.C. dan Jakarta.

⁴ Lihat Bagian III di bawah.

⁵ Panel Pemberi Pinjaman akan terus meninjau kewajiban LARAP (pemukiman kembali), AMDAL, dan Program Sosial Terpadu (“ISP”) BP. Panel Pemberi Pinjaman meninjau isu ISP dan pemukiman kembali setiap dua tahun sekali hingga 2009; tinjauan ISP akan diteruskan hingga 2021; pemantauan lingkungan akan dilakukan setiap tahun sepanjang masa pinjaman (15 tahun) untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan ADB dan Japan Bank for International Cooperation. Salinan AMDAL tersedia di: <http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=9004750&contentId=7008790>.

TIAP telah mengidentifikasi beberapa isu besar yang harus diprioritaskan BP di masa depan:

1. **Ekspansi Tangguh.** Ke depannya, ekspansi dapat menjadi isu baru paling signifikan termasuk didalamnya tahap awal pembangunan *train* pengolahan ketiga kilang LNG berikut tujuh sumur baru dan dua platform baru di sekitar Teluk Bintuni. Proposal konstruksinya menghadirkan beragam isu dan risiko yang harus menjadi perhatian utama BP dan TIAP. Dalam persiapan ekspansi ini, BP tidak boleh melupakan fokus dan dukungan terhadap program sosial, ekonomi, tata kelola pemerintah dan keamanan yang telah dijalankan dalam sepuluh tahun terakhir.
2. **Stabilitas Bintuni.** Masuknya berbagai perusahaan minyak dan gas baru ke Teluk Bintuni menimbulkan beragam tantangan dan risiko bagi BP dan wilayah tersebut. Munculnya perusahaan baru yang beroperasi di sana tanpa memenuhi standar yang telah ditetapkan Tangguh dalam hal program sosial, lingkungan dan keamanan merupakan ancaman serius. Panel menyadari bahwa tindakan para pendatang baru ini di luar kendali BP. Meski demikian, Panel mendesak BP untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan tersebut dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk mendorong penerapan praktik terbaik yang telah dijalankan BP.
3. **Elektrifikasi dan Langkah Selanjutnya.** Elektrifikasi Teluk Bintuni melalui penjualan listrik yang dihasilkan di kilang LNG Tangguh adalah program yang disambut baik dan didukung oleh TIAP sejak dulu. Potensi pembangkit listrik tambahan setelah penyelesaian *train* ketiga juga akan menjadi langkah yang amat positif menuju pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. Setelah infrastruktur penting ini beroperasi, TIAP menganjurkan BP mencari cara untuk memperbaharui dan

mengembangkan program-programnya dalam memanfaatkan akses listrik yang lebih luas.

4. **Pendekatan (Hubungan) Pemerintah dan Masyarakat.**

TIAP sangat yakin BP harus lebih memperhatikan dan mengalokasikan sumber dayanya terhadap hubungan dengan pemerintah di tingkat regional dan nasional serta media. Panel menyadari tantangan geografis dan logistik yang menghambat perjalanan di negara ini. Meski demikian, BP harus mengupayakan hubungan yang lebih erat dengan berbagai institusi demi keberhasilan program dan hubungannya dengan masyarakat luas dalam jangka panjang.

II. Perkembangan Terkini dan Ikhtisar

Tangguh kini beroperasi penuh dengan *Train 1* dan *2* beroperasi pada kapasitas 100%. Kapal tanker LNG melakukan pemuatan beberapa kali dalam seminggu. Lokasinya terpencil. Selain desa-desa di Tanah Merah Baru dan Saengga yang terkena dampak pemukiman kembali (“RAV”),⁶ yang jaraknya beberapa kilometer, kota terdekat – Bintuni dan Babo – masing-masing berjarak dua jam menggunakan perahu dari lokasi kilang. Desa pesisir utara yang terdekat berjarak sekitar 30 kilometer melintasi teluk; sekitar satu setengah jam menggunakan *speed boat*. Luas areal fasilitas Tangguh sekitar 404 hektar, dikelilingi hutan lindung seluas 2.862 hektar. Api gas di kilang ini dapat terlihat dari berbagai bagian teluk. Dua dermaga, salah satunya sebagai tempat berlabuh kapal tanker, membentang satu kilometer sepanjang pesisir. Zona eksklusi laut di sekitar dermaga tersebut menghambat pergerakan nelayan lokal dari kampung

⁶ Sembilan desa dekat kilang LNG disebutkan dalam AMDAL sebagai Desa Yang Terkena Dampak Langsung (“DAV”), yang menjadi target program dan penerima dana khusus. Desa Tanah Merah (lokasi kilang), Saengga (yang menyediakan lahan tempat pemukiman kembali sebagian besar warga desa Tanah Merah) dan Onar (tempat pemukiman kembali bagi penduduk Tanah Merah yang lain) juga dikategorikan sebagai Desa Yang Terkena Dampak Pemukiman Kembali (“RAV”), yang juga diatur oleh Rencana Kerja Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali (“LARAP”). LARAP berakhir tahun 2009 dan RAV dimasukkan ke dalam program-program lanjutan sama seperti DAV.

pemukiman kembali. Dua platform lepas pantai mengekstraksi gas dari 15 sumur dan mengalirkannya ke pesisir dan tidak mengganggu kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan operasional lain.

Diperkirakan, terdapat 1.978 karyawan yang bekerja di kilang LNG di bulan Juli 2012, sebagian besarnya pekerja “*back-to-back*”. Secara total ada 3.420 karyawan di bulan Juli 2012. Sekitar 54% pekerja, termasuk yang dipekerjakan oleh kontraktor keamanan swasta, adalah penduduk asli Papua. Kebanyakan berasal dari desa yang terkena dampak langsung (“DAV”) dan daerah lain di wilayah Kepala Burung Papua. Karyawan asli Papua juga mencakup 126 teknisi terampil yang telah menyelesaikan program pelatihan khusus BP yang kini sudah memasuki tahun keenam. Beberapa teknisi itu telah mencapai posisi di mana mereka membantu mengoperasikan kilang dari Ruang Kendali Utama.

Sejak pembangunannya, semua DAV di dekat kilang (dalam radius 30-40 kilometer) telah mengalami peningkatan populasi (sebagian besarnya bukan penduduk asli) dan pertumbuhan kegiatan ekonomi termasuk peningkatan pendapatan per kapita. Tetapi ada DAV yang pertumbuhannya lebih tinggi dibanding DAV lain yang mengakibatkan ketegangan berkelanjutan. Hal ini terjadi di kalangan penduduk kampung di pesisir utara yang merasa sebagian besar bantuan dari Tangguh dialokasikan ke RAV di pesisir selatan yang memiliki perumahan dan bangunan umum baru serta listrik. Meski demikian, semua DAV memiliki fasilitas dan layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, sistem distribusi air bersih, pekerjaan untuk pemuda dan pemudi serta program mata pencaharian bagi mereka yang tidak dipekerjakan oleh Tangguh. Dalam waktu dekat, semua DAV dan Kota Bintuni akan mendapatkan pasokan listrik melalui daya yang dihasilkan di Tangguh.⁷ Perbedaan paling besar antara DAV adalah perumahan dan infrastruktur desa, serta perbedaan tingkat pendapatan per

⁷ Lihat bagian VI(e) di bawah.

kapita mereka (antara Rp350.000 hingga Rp860.000). Panel merasa bahwa manfaat dari Tangguh jelas belum merata ke seluruh wilayah.

Kegiatan ekonomi dan populasi di Kabupaten Teluk Bintuni terus meningkat pesat. Sebagian besarnya disebabkan karena migrasi masuk orang non-Papua dari wilayah Indonesia Timur yang lain dan Jawa. Hal ini tampak di ibu kota Bintuni yang populasinya naik dua kali lipat menjadi 19.678 sejak perubahan statusnya menjadi kabupaten di tahun 2004. Di kota itu juga terdapat banyak pembangunan dan pengembangan, terutama rumah sakit modern dan kompleks pemerintahan di pinggiran kota. Kini ada penerbangan komersial ke bandarannya. Bupati Alfons Manibui dan wakilnya terpilih kembali pada tahun 2011 untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir.

Babo, yang berperan sebagai pusat suplai dan pangkalan Tangguh pada fase konstruksi, mengalami penurunan kegiatan komersial, meskipun memiliki lalu lintas laut yang signifikan dan landasan udara yang dibangun BP, masih beroperasi. BP bukan satu-satunya pemegang lisensi asing yang beroperasi di wilayah tersebut; juga ada penangkapan ikan komersial dan operasi penebangan hutan yang bukan dikelola masyarakat asli (kendati demikian tidak ada pengguna pukat asing yang beroperasi di Teluk Bintuni), serta beberapa perusahaan minyak dan gas yang mengeksplorasi wilayah sekitar Teluk Bintuni berdasarkan kontrak kerja sama dengan BPMigas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Salah satu perusahaan tersebut, Genting Oil, tengah melakukan eksplorasi gas dalam perimeter kilang LNG Tangguh.

Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat, juga terus tumbuh sejak pembentukannya di tahun 2004. Kini di sana banyak berbagai kegiatan ekonomi dan konstruksi baru, baik pemerintah maupun swasta. Akan tetapi, meski ada peningkatan kondisi jalan, ibu kota provinsi

masih berjarak enam jam perjalanan dari Bintuni. Gubernur Bram Atururi terpilih kembali pada November 2011 untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir.

Jayapura, ibu kota Papua sejak dulu dan kini ibu kota Provinsi Papua (sekitar dua pertiga Papua terdahulu), juga mengalami pertumbuhan signifikan berkat migrasi masuk serta banyak terjadi ketegangan politik.⁸ Jayapura tidak terlibat langsung dengan sebagian besar urusan Tangguh sejak pemekaran provinsi di tahun 2004, meski demikian, Pangdam dan Kapolda di Jayapura tetap berwenang atas keamanan di kedua provinsi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Panel tidak bisa bepergian ke Jayapura karena insiden kekerasan terkait separatis atau aktivis kemerdekaan. Oktober lalu, di penghujung kegiatan Majelis Rakyat Papua di Jayapura di mana separatis memainkan peranan penting, tiga peserta terbunuh dalam bentrok melawan pasukan keamanan. Peristiwa tersebut diikuti berbagai insiden lain.⁹ Warga negara asing juga tidak diizinkan memasuki Papua tanpa surat keterangan jalan (“SKJ”) yang diberikan hanya untuk perjalanan bisnis yang sah. Karena itulah kehadiran LSM, pelajar, media dan bahkan turis asing di wilayah tersebut sangat langka.

Dukungan terhadap Proyek di kalangan penduduk adat dan pemerintah masih kuat, meski tidak sepenuhnya. Bupati dan pemimpin daerah lainnya secara umum menyukai cara BP bekerja sama dengan mereka untuk menyediakan pekerjaan yang layak serta meningkatkan pelayanan lokal. Meski demikian, ada kritik mengenai perlakuan berbeda terhadap pedesaan di pesisir utara serta isu ketenagakerjaan, hambatan ke tempat menangkap ikan dan kekhawatiran karyawan asli Papua mengenai peluang untuk mengembangkan karier. Di tingkat lokal dan provinsi ada

⁸ Kontroversi pencalonan kembali mantan Gubernur Barnabas Suebu, dan pertikaian mengenai siapa yang layak menentukan keabsahan para kandidat telah menghambat pemilihan gubernur selama lebih dari setahun. Lihat hal. 10-11 di bawah.

⁹ Lihat bagian III di bawah.

keluhan mengenai kurangnya kompensasi untuk tanah adat dan hak adat,¹⁰ dan di tingkat provinsi muncul kritik terhadap arus informasi dan strategi komunikasi BP. Sistem keluhan yang diperuntukkan bagi penduduk di tingkat kampung sepertinya berfungsi baik. Dari 115 keluhan yang disampaikan pada tahun 2011, dan 18 yang disampaikan pada Juni 2012, sebagian besarnya terkait isu tenaga kerja atau pengembangan masyarakat. Tidak ada keluhan mengenai hak asasi manusia, keamanan, atau perlakuan buruk.

Di tingkat nasional, Menteri dan pejabat senior pemerintah Indonesia sering memuji Tangguh, tapi sedikit yang tahu tentang Proyek atau manfaatnya bagi warga Papua. Perhatian mereka kini tertuju pada ekspansi Tangguh, misalnya siapa yang akan mendapat tambahan suplai LNG, sebesar apa jatah dalam negeri dan proyek baru apa yang akan dibangun sebagai hasilnya. Ada kepuasan bahwa Tangguh membantu proses elektrifikasi di wilayah Papua dan harapan bahwa ekspansi ini akan membawa pembangunan ekonomi lebih lanjut dan stabilitas di sana. Meski Program Pengamanan Terpadu Berbasis Masyarakat (“ICBS”) tidak terlalu dikenal, ada kelegaan bahwa ICBS berfungsi efektif dan tak ada masalah keamanan atau hak asasi manusia terjadi di Tangguh.

Manajemen BP Indonesia kini memusatkan perhatiannya pada ekspansi Tangguh. Proposal untuk *train* ketiga yang akan meningkatkan kapasitas Tangguh sekitar 50% berikut beberapa sumur dan platform baru, sebuah dermaga baru, dan landasan pacu dalam perimeter kilang telah diajukan pada pemerintah Indonesia. Rencana Pengembangan Lanjutan (“POFD”) sudah diajukan ke BPMIGAS pada tanggal 10 September 2012. Tanpa bisa dihindari, perencanaan, desain teknis, isu komersial, kepatuhan terhadap peraturan, tuntutan politis dan masalah konstruksi akan menjadi pusat perhatian manajemen BP selama dua hingga lima tahun

¹⁰ MRP mengeluhkan tidak adanya strategi untuk memberi manfaat kepada pemilik tanah adat. Mereka menyatakan bahwa kompensasi adat harus sebesar Rp60 miliar, tapi yang dibayar hanya Rp6 miliar. Lihat hal. 42-43 di bawah.

mendatang. Ini merupakan peluang sekaligus potensi risiko. BP harus memastikan program-program yang tengah berjalan takkan terbengkalai. Tapi BP juga harus mengatur ulang beberapa kewajiban awalnya untuk mengatasi masalah yang telah muncul atau belum tampak saat Proyek dimulai.¹¹

III. Perkembangan Politik dan Keamanan

Iklim politik di Papua terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir dan merupakan ancaman serius bagi stabilitas pemerintahan, keamanan, dan ekonomi di wilayah tersebut. Sejak tahun 2011, ketidakstabilan ini meledak menjadi rangkaian insiden kekerasan di Provinsi Papua. Hal ini kian mempertegang hubungan antara Jakarta dan Papua, antara petugas keamanan dan warga Papua serta antara berbagai kelompok di Papua. Ketidakstabilan politik juga melumpuhkan proses pemilu, menghambat pemilihan gubernur Papua dan Papua Barat dan hingga saat ini membuat Papua dikepalai pejabat pelaksana dari Kementerian Dalam Negeri. Meski insiden kekerasan umumnya terjadi di Provinsi Papua, ketidakpuasan politik yang menyebabkannya mulai merambat ke Papua Barat.

¹¹ Lihat hal. 47-49 di bawah.

Ketegangan dalam sepuluh tahun terakhir pada dasarnya merupakan dampak kian merebaknya ketidakpuasan terhadap implementasi Otonomi Khusus dan pertikaian terkait pemekaran provinsi di tahun 2003.¹² Meski semua faktor itu adalah sumber ketegangan, ketidakstabilan yang terjadi saat ini terutama disebabkan oleh tiga hal: pertama, pertikaian politik antara Gubernur dan DPRD; kedua, meningkatnya kekerasan yang ditimbulkan kelompok radikal yang menolak masuknya Papua ke dalam Indonesia serta aksi dan reaksi keras petugas keamanan terhadap provokasi tersebut, terutama oleh Brigade Mobil; dan ketiga, konflik terkait kepemilikan sumber daya alam.

Fraksi-fraksi di DPRD Papua dan Papua Barat mencari-cari celah dalam peraturan Otonomi Khusus untuk menghalangi kandidat gubernur yang mencalonkan diri untuk dipilih kembali untuk masa jabatan lima tahun kedua dan terakhir di masing-masing provinsi.¹³ Gugatan terhadap proses pemilu yang berulang kali terjadi ini didasarkan pada pernyataan bahwa DPRD dan Majelis Rakyat Papua (“MRP”) harus memastikan bahwa calon gubernur adalah penduduk asli Papua, dan persyaratan ini selalu digugat untuk posisi Wakil Gubernur. Gugat-menggugat ini akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi sekaligus mencederai proses pemilu. Masa jabatan Gubernur Papua Barat Bram Atururi berakhir pada Maret 2011; setelah beberapa penundaan, pemilihan gubernur dilaksanakan pada November 2011. Masa jabatan Gubernur Papua Barnabas Suebu berakhir pada Juli 2011. Di bulan September 2011, MK memutuskan bahwa Gubernur Suebu dapat mencalonkan diri kembali, tapi tanggal pemilihan gubernur belum

¹² Undang-Undang (UU) No. 21/2001 Otonomi Khusus mewakili dukungan politik/ekonomi fundamental terhadap stabilitas di Papua; UU ini memberikan Papua manfaat ekonomi dan politik unik sebagai mekanisme untuk meredakan upaya kemerdekaan dan meningkatkan indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial. Otonomi Khusus, atau dikenal sebagai Otsus di Papua, memberikan tambahan pendanaan signifikan bagi program-program provinsi dan kabupaten, serta merupakan pengakuan terhadap keunikan warisan budaya Papua. Pendapatan dalam jumlah sangat besar kini mengalir ke Papua, dengan rincian detail di bagian IX di bawah, tapi manfaat pendapatan ini tidak dirasakan secara merata oleh semua penduduk asli Papua, dan kini banyak yang merasa bahwa pengakuan terhadap keunikan budaya Papua tersebut telah diabaikan.

¹³ Keduanya merupakan Gubernur pertama yang dipilih secara demokratis di provinsi-provinsi tersebut.

ditentukan.¹⁴ Selain berdampak besar terhadap stabilitas politik, salah satu dampak langsung dari kebuntuan ini bagi Tangguh adalah kegagalan pemerintah provinsi untuk menerapkan peraturan penting dalam Otonomi Khusus terkait alokasi pendapatan sumber daya alam. Dampak lebih luasnya adalah kekosongan yang mempersulit pemerintah Indonesia menerapkan Percepatan dan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang dirancang pada tahun 2007 dan bertujuan untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan sosial, dan menyediakan langkah-langkah jelas bagi warga Papua.¹⁵

Tahun lalu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (“SBY”) memulai upaya lain untuk meningkatkan implementasi Otonomi Khusus, menjangkau warga Papua dan meredakan konflik dengan membentuk (“UP4B”) di bulan September 2011. Unit ini dikepalai oleh Letjen (Purn.) Bambang Darmono yang dihormati banyak kalangan. UP4B difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan ekonomi seperti jalan dan bandara baru yang dapat menarik perhatian nasional dan bisa dianggap sebagai sebuah keberhasilan. Salah satu projek itu adalah pembangunan pabrik petrokimia di Teluk Bintuni yang akan mendapatkan suplai gas dari Tangguh Train 3. Manfaatnya terhadap masyarakat Teluk Bintuni atau masyarakat Papua masih dipertanyakan. Sebuah fasilitas industri besar yang sangat kecil kemungkinannya mempekerjakan penduduk asli Papua atau terbaginya pendapatan bukanlah hal yang diinginkan penduduk lokal. Salah satu keluhan mengenai UP4B adalah lembaga itu diciptakan dan dijalankan Jakarta tanpa masukan berarti dari penduduk asli Papua. Gagasan pembangunan pabrik petrokimia di Teluk Bintuni mengilustrasikan keluhan ini. Meski demikian, UP4B juga bekerja sama dengan BP dan perusahaan listrik negara PLN dalam proyek elektrifikasi di Teluk

¹⁴ Lihat laporan International Crisis Group (“ICG”), “Indonesia: Dynamics of Violence in Papua,” Asia Report N° 232 (Aug. 9, 2012) untuk penjelasan detail mengenai tantangan-tantangan tersebut [selanjutnya disebut sebagai “laporan ICG”].

¹⁵ Lihat Laporan Keenam TIAP (Mar. 2008), hal. 15.

Bintuni.¹⁶ Berhasil tidaknya program pembangunan UP4B kemungkinan takkan memiliki dampak berarti terhadap kemelut politik atau kebijakan keamanan yang berada di bawah kewenangan beberapa lembaga dan kementerian, masing-masing memiliki agenda sendiri.

Karena itulah keamanan terus memburuk, terutama di wilayah Jayapura. Kekosongan politik dan peran Jakarta kian memotivasi mereka yang mendukung kekerasan radikal. Kekerasan tersebut telah merebak di dan sekitar Jayapura dan beberapa lokasi lain di Provinsi Papua. Selama beberapa tahun terakhir, ketegangan keamanan umumnya terbatas pada insiden kekerasan polisi dan TNI yang terisolasi¹⁷ dan penahanan serta penghukuman warga Papua yang mengibarkan bendera bintang kejora. Meski demikian, belakangan ini ketegangan politik tersebut lebih sering meledak dan sepertinya lebih meluas.

Di bulan Oktober 2011, terjadi bentrokan di Jayapura dalam Kongres Rakyat Papua Ketiga. Pada hari ketiga dan terakhir acara tersebut, sejumlah besar aparat kepolisian dan TNI membubarkan kongres dengan paksa. Berbagai laporan mengindikasikan bahwa menyusul pernyataan kemerdekaan dari Indonesia yang dilontarkan penyelenggara, aparat keamanan melakukan penangkapan, penembakan dan pemukulan massal terhadap peserta. Tiga orang terbunuh; banyak pula yang harus dirawat di rumah sakit. Setelah penyelidikan, kepala kepolisian kota mendapat peringatan tertulis. Dia dimutasi dan tujuh perwira junior divonis dua minggu penjara. Penyelenggara kongres dituduh makar dan divonis lima tahun penjara.¹⁸

¹⁶ Lihat Bagian VI(e) di bawah.

¹⁷ Sebagai contoh, lihat Human Rights Watch's 2012 World Report: Indonesia, hal. 4. Lihat juga Laporan Pertama TIAP mengenai Tahap Operasional (Jan. 2011), hal. 15, yang menggambarkan siksaan yang dilakukan prajurit TNI terhadap seorang tahanan di Puncak Jaya, berujung pada vonis pidana ringan dan hukuman penjara 8-10 bulan.

¹⁸ Sebagai contoh, lihat laporan ICG report, hal. 9. Reaksi keras aparat keamanan dan penuntutan membuat Departemen Luar Negeri AS "mendesak pemerintah Indonesia untuk menjamin proses hukum dan perlindungan prosedural sesuai dengan hukum Indonesia dan kewajiban internasional Indonesia bagi semua orang yang didakwa.... Kami mendorong pemerintah Indonesia untuk bekerja sama dengan penduduk asli Papua untuk mengatasi keluhan mereka, menyelesaikan konflik dengan damai dan mendukung pembangunan di Provinsi Papua." *Juru bicara*, 31 Januari 2012.

Setidaknya lima belas insiden terjadi antara bulan Mei dan Juni 2012, dan terus berlanjut sepanjang musim panas. Beberapa dari insiden tersebut disebabkan oleh mereka yang menolak masuknya Papua ke Indonesia. Insiden lainnya rupanya terkait dengan dugaan pembayaran untuk mendapat perlindungan polisi. Meski mustahil TIAP menjelaskan penyebab pasti insiden-insiden tersebut, dan masing-masing memiliki dinamika politiknya tersendiri, akibatnya sama saja: memburuknya keamanan, meningkatnya ketegangan dan ketidakpuasan terhadap polisi dan kenyataan bahwa kebijakan pemerintahan SBY belum berhasil meredam kekuatan politik yang menentang Otonomi Khusus dan menginginkan kemerdekaan. Lebih penting lagi, semua insiden ini terjadi di Provinsi Papua; sampai saat ini telah terjadi beberapa insiden kekerasan berbasis politik atau keamanan di Provinsi Papua Barat.¹⁹

Tak banyak yang bisa BP lakukan secara langsung untuk mengurangi insiden kekerasan politik di Provinsi Papua, atau memengaruhi proses politik di Papua Barat. Tapi sebagian besar insiden kekerasan ini disebabkan reaksi aparat keamanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ancaman. Hal ini merupakan dampak langsung kurangnya pelatihan, pengawasan dan akuntabilitas oknum aparat kepolisian dan TNI yang ditugaskan di wilayah terpencil Papua.²⁰ BP dapat bertindak untuk mengurangi risiko insiden kekerasan di atau sekitar Teluk Bintuni. BP dan Kepolisian telah membuat kesepakatan untuk menjunjung hak asasi manusia dan menggunakan kekuatan minimal (“JUKLAP/PAMBERS”). Kesepakatan ini mewajibkan kepatuhan terhadap Prinsip Dasar PBB Mengenai Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Penegak Hukum; dan

¹⁹ Departemen Luar Negeri AS, 2011 Country Report on Human Rights in Indonesia, menyatakan: “Masalah-masalah hak asasi manusia utama termasuk kejadian pembunuhan sewenang-wenang dan melanggar hukum oleh pasukan keamanan dan lain-lain di Papua dan Papua Barat...” Laporan ini menggambarkan banyak insiden keamanan dan menyatakan: “Sepanjang tahun itu, masyarakat adat, terutama di Papua, tetap mengalami diskriminasi luas, dan sedikit sekali perbaikan dalam hal hak atas tanah adat mereka ... Di Papua, ketegangan terus terjadi antara penduduk asli Papua dan pendatang dari provinsi lain, antara masyarakat pesisir dan pedalaman, dan antara suku-suku asli.”

²⁰ Banyak yang cemas TNI berencana meningkatkan pasukan di Teluk Bintuni. Rencana jangka panjang ini dibenarkan oleh pejabat senior TNI.

Prinsip-Prinsip Sukarela. Kesepakatan ini juga memuat peraturan tentang disiplin dan sanksi pelanggaran. Semua anggota kepolisian yang bertugas menjaga Tangguh wajib menjalani pelatihan prinsip-prinsip tersebut. BP bertugas menggelar semua latihan khusus dan polisi diharuskan menyediakan pelatihan yang diminta BP. JUKLAP/PAMBERS juga mengharuskan latihan bersama “setidaknya sekali dalam setahun atau lebih jika dibutuhkan” untuk memastikan implementasi yang layak jika muncul keadaan darurat. Latihan ini dibatalkan tahun lalu karena kepolisian punya prioritas lain di Provinsi Papua. Latihan ini tak boleh dibatalkan lagi. Rangkaian aksi kekerasan di Papua menggarisbawahi betapa penting dan mendesaknya kepatuhan terhadap program latihan keamanan ini.

IV. Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Tangguh

Meski mayoritas gejolak dan kekerasan politik di Papua terjadi di Provinsi Papua, Papua Barat tidak terbebas dari risiko itu. Di bulan Desember 2011, kediaman dinas Gubernur di Manokwari dibakar dalam kerusuhan terkait hasil pemilihan gubernur. Pencegahan konflik dan kekerasan seperti demikian sangatlah penting di Teluk Bintuni yang memiliki sejarah damai dan rukun. Beberapa pejabat mengedepankan pentingnya mengindari situasi keamanan “seperti Freeport.” Untuk mencapai tujuan tersebut, BP telah merancang dan mengimplementasikan ICBS untuk memberikan pengamanan sekaligus meminimalkan risiko konfrontasi antara masyarakat asli dan aparat keamanan. ICBS yang awalnya merupakan konsep yang baru dan belum teruji kini diterapkan dengan efektif. Lingkaran pengamanan dalam dijaga oleh petugas keamanan tersendiri, semuanya penduduk asli Papua, sebagian besar dari wilayah lokal. Hal ini memberikan pengamanan harian berkarakter lokal sekaligus menyediakan pekerjaan layak bagi pemuda lokal serta memberikan rasa persaudaraan bagi kampung-kampung dalam wilayah tersebut melalui keberadaan petugas keamanan.

Kontrak kontraktor keamanan pertama berakhir pada 2011. Sesuai ketentuan hukum, BP melakukan proses tender untuk mendapatkan kontraktor baru. Setelah pemilihan oleh BP dan disetujui oleh BPMigas, kontrak tersebut diberikan kepada P.T. Gardatama Nusantara; dan akan efektif hingga Februari 2014. Kontraktor keamanan yang baru mempertahankan semua petugas keamanan asli Papua yang telah dilatih. Ke depannya, penting bagi BP untuk mendapatkan kontraktor baru yang berkomitmen mempertahankan semua petugas keamanan dengan reputasi baik. Akan ada konflik besar jika kontraktor baru memecat petugas-petugas keamanan itu tanpa sebab yang jelas.

Dengan ICBS, seluruh aparat keamanan baik swasta atau umum, yang dapat dipanggil untuk menangani keadaan darurat dilatih untuk lebih mengenal Prinsip-Prinsip Sukarela, Prinsip Dasar PBB Mengenai Penggunaan Kekuatan, dan prinsip hak asasi manusia secara umum. Bagi kepolisian, hal ini diwajibkan oleh JUKLAP-PAMBERS. Dan bagi TNI, hal ini telah diadopsi meski tidak secara formal oleh Pangdam. Kendati demikian, ada beberapa hal yang mengancam penerapan ICBS dan mengingat betapa peliknya penerapan keamanan di Papua, BP harus mencegah ancaman-ancaman tersebut. Dua ancaman utama adalah sebagai berikut: pertama, dampak kegiatan keamanan yang dijalankan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dekat Tangguh; kedua, pentingnya mendidik dan memperkuat tenaga keamanan lokal dengan prinsip-prinsip ICBS.

Perusahaan minyak dan gas lain kini beroperasi di Teluk Bintuni. Hal ini meningkatkan kekhawatiran terkait hubungan dengan masyarakat, dampak lingkungan, dan keamanan. Yang paling mencemaskan adalah perusahaan-perusahaan tersebut mungkin takkan menghormati kepentingan lokal dan dapat memicu aksi yang berujung pada reaksi keras dari aparat keamanan negara. Reaksi kepolisian dan TNI seperti itulah yang menyebabkan kekerasan terus berlanjut di

tambang Freeport Grasberg. Salah satu perusahaan tersebut, Genting Oil, tengah beroperasi di wilayah Tangguh karena memiliki hak eksploitasi gas *onshore subsurface*. Perusahaan ini membawa banyak personel TNI yang dibayar untuk mengamankan lokasi tersebut. Pasukan itu mendirikan pangkalan sementara di dekat Tanah Merah Baru. ICBS dirancang untuk menghindari tindakan-tindakan seperti ini: menempatkan personel TNI atau polisi di atau sekitar desa-desa Teluk Bintuni. BP tak dapat mengendalikan kegiatan perusahaan lain yang sah di wilayah ini. Tapi BP bisa memberitahukan keemasannya, dan memberi peringatan kepada pemimpin militer dan politik yang berwenang.

Panel memulai upaya tersebut, dengan memberitahukan situasi ini kepada para pemimpin TNI di Papua dan pejabat pemerintah Indonesia di Jakarta, termasuk Direktur BPMigas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. BP telah melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Genting Oil dan pejabat pemerintah Indonesia terkait perlunya perhatian serius terhadap masalah ini. Pemerintah Indonesia bertindak dengan baik dan tegas. Panel mendapatkan kabar bahwa Genting didesak oleh BPMigas untuk menggunakan tenaga keamanan profesional, dan bukan oknum TNI, untuk kegiatannya di masa depan. Hal ini akan menjadi preseden yang sangat baik bagi perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di wilayah tersebut.

BP akan terus bekerja sama dengan Genting dan perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di Teluk Bintuni, serta dengan pejabat militer, polisi dan pemerintah, untuk menekankan pentingnya keamanan berbasis masyarakat dan mencegah langkah-langkah yang bisa menimbulkan insiden keamanan. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah mendorong perusahaan-perusahaan itu untuk memberikan pelatihan prinsip hak asasi manusia bagi tenaga keamanan yang dipekerjakan di wilayah itu. Lebih jauh lagi, BP harus mendorong pemerintah

Indonesia untuk mewajibkan semua perusahaan yang beroperasi di Papua untuk menerapkan ICBS. Pejabat senior pemerintah memberi tahu Panel bahwa mereka ingin perusahaan lain untuk mengikuti model keamanan Tangguh; mereka dapat diwajibkan atau didorong untuk melakukannya. Bagaimanapun juga, BP harus memantau kegiatan keamanan perusahaan-perusahaan tersebut secara saksama. Demi kepentingan semua pihak, potensi konfrontasi antara masyarakat adat dan personel keamanan harus dihindari. Meski BP tidak dapat memaksa perusahaan lain untuk menerapkan ICBS atau mematuhi Prinsip Sukarela, kasus Genting menunjukkan bahwa BP dapat menekan perusahaan lain untuk tidak menggunakan aparat keamanan negara yang dapat mengganggu kedamaian dan ketenteraman di Teluk Bintuni.

Ancaman keamanan kedua adalah kegagalan menerapkan ICBS sepenuhnya, yang mencakup latihan tahunan wajib. Efektivitas ICBS bergantung pada pemahaman tenaga keamanan di wilayah tersebut terhadap prinsip-prinsipnya. Hal ini penting karena sampai saat ini ICBS tidak terlalu dikenal oleh institusi-institusi itu. Bahkan di mata mereka, ICBS adalah bentuk pengamanan yang baru dan berbeda. Pengamanan aset vital nasional oleh aparat keamanan negara sejak dulu merupakan prinsip kebijakan; kepatuhan terhadap Prinsip Sukarela bukan prinsip kebijakan. Pentingnya penerapan rutin ICBS disela oleh tingginya tingkat rotasi komandan dan personel kepolisian dan TNI di Papua. Latihan tidak digelar satu tahun saja dapat berakibat pada separuh personel utama tidak memahami prinsip ICBS.²¹ Karena itulah kesepakatan JUKLAP-PAMBERS dengan kepolisian mewajibkan latihan bersama untuk memberikan pengalaman lapangan dan koordinasi pelatihan cara merespons ancaman keamanan seperti protes dan demonstrasi. Latihan bersama ini secara langsung melibatkan BP, keamanan swasta dan kepolisian Papua. Disarankan bahwa TNI dan LSM berfungsi sebagai pengamat dan

²¹ Kapolres Teluk Bintuni belum pernah memasuki perimeter Tangguh dan tidak tahu mengenai rencana latihan bersama. Dia menyatakan bahwa harus ada komunikasi lebih baik antara kepolisian dan petugas keamanan swasta.

mereka telah melakukan hal ini. Latihan ini dibatalkan di tahun 2011 karena kerusuhan di Papua. Pembatalan ini bukanlah preseden yang baik; hal ini harus dihindari di masa depan.²² BP harus bekerja sama dengan Kapolda dan Pangdam tiap tahun untuk menjadwalkan latihan ini. Jika ada kegiatan prioritas lain, BP harus menjadwalkan latihan bersama yang lebih terbatas. Meski demikian, pengetahuan aparat keamanan mengenai konsep dan prosedur ICBS adalah hal utama yang menjamin efektivitasnya di tengah keadaan darurat saat begitu banyak hal buruk bisa terjadi.

Elemen penting lain dari ICBS dan JUKLAP-PAMBERS adalah pelatihan wajib dalam hal hak asasi manusia bagi personel keamanan di Tangguh. Ini pelatihan penting mengenai hal-hal prinsip seperti rasa hormat terhadap hak seseorang, hak untuk berkumpul dalam damai, dan penggunaan kekuatan yang sesuai. Konsep-konsep ini tidak terlalu dikenal oleh personel muda polisi dan TNI. Pelatihan aparat kepolisian diwajibkan oleh JUKLAP-PAMBERS; pelatihan personel TNI telah direkomendasikan oleh TIAP dan disetujui oleh komandan TNI terdahulu. Pelatihan ini harus menjadi siklus rutin dan diberikan secara berkala kepada personel kepolisian dan TNI yang mungkin akan ditugaskan menangani keadaan darurat. BP berkomitmen terhadap pelatihan ini dan telah melatih personel-personel tersebut tahun lalu. BP menerapkan pendekatan “melatih pelatih” yang memanfaatkan polisi yang telah dilatih untuk melatih personel lain. Meski metode ini efektif, pelatihan bisa melemah atau ketinggalan zaman. Program ini harus diperbarui secara rutin dengan melibatkan aktivis hak asasi manusia profesional. BP harus melibatkan Komite Palang Merah Internasional (“ICRC”) secara berkala dalam pelatihan hak asasi manusia ini sebagai pihak yang pertama kali memulai pelatihan ini atau pihak lain yang direkomendasikan oleh Kantor Program Pendampingan Pelatihan Investigasi Internasional

²² Pada saat kunjungan TIAP, latihan bersama tahun 2012 dijadwalkan akan digelar bulan November.

("ICITAP") di bawah Departemen Kehakiman AS yang turut menyediakan dana untuk program ini.

Rekomendasi: Keamanan dan Hak Asasi Manusia

- 1. BP harus mewajibkan kontraktor keamanan swasta baru untuk mempertahankan petugas keamanan asli Papua yang memiliki kinerja baik.**
- 2. BP harus bekerja sama dengan Genting Oil dan perusahaan lain yang melakukan eksplorasi di Teluk Bintuni, serta dengan pejabat pemerintah dan keamanan untuk mendorong penerapan prinsip ICBS dalam operasi keamanan mereka dan minimal memberikan pelatihan hak asasi manusia bagi personel polisi atau TNI yang ditugaskan sebagai tenaga keamanan.**
- 3. Latihan bersama tahunan sesuai kesepakatan dengan kepolisian harus dilakukan tiap tahun. Jika latihan penuh tak dapat dilaksanakan, BP harus bekerja sama dengan kepolisian dan TNI untuk menjadwalkan latihan yang lebih terbatas.**
- 4. ICRC atau organisasi pelatihan hak asasi manusia profesional lain sebaiknya dilibatkan secara berkala untuk membarui program pelatihan bagi tenaga keamanan dan memastikan program tersebut sesuai perkembangan zaman dan lengkap.**

V. Hubungan Pemerintah dan Masyarakat

Salah satu isu yang sering dibahas dalam pertemuan TIAP adalah perlunya BP meningkatkan hubungannya dengan pemerintah dan menggiatkan kegiatan informasi publik. Kebutuhan ini disebutkan sebagai prioritas *sua sponte* (yang perlu dilakukan tanpa diminta) oleh banyak pejabat senior, termasuk Menteri, di tingkat nasional dan regional. Banyaknya pejabat pemerintah yang tidak mengetahui keberadaan Tangguh dan program-programnya adalah hal yang dapat dimaklumi; tapi banyaknya pejabat senior di Jakarta yang bertanggung jawab atas aspek-aspek Tangguh dan tidak mengetahui program dan manfaatnya bagi penduduk setempat dan masyarakat Papua pada umumnya adalah hal yang tak dapat diterima. Hal ini penting dan sangat disayangkan karena beberapa pejabat tersebut bertugas menerapkan kebijakan yang menunjukkan manfaat bagi penduduk asli Papua.

Ketidaktahuan serupa juga eksis di tingkat regional, bahkan lebih parah. BP telah memfokuskan kegiatan hubungan pemerintahnya di tingkat kabupaten dan berhasil menjalin dan mempertahankan hubungan baik dengan Bupati dan pemerintahannya. Tapi BP tidak membina hubungan yang efektif dengan pemerintah Provinsi Papua Barat meski Tangguh berada di bawah yurisdiksi Papua Barat sejak 2004. TIAP berulang kali menyerukan kepada BP untuk membina dan meningkatkan fungsi hubungan pemerintah di Manokwari. Meski demikian, BP belum rutin memberikan informasi lengkap mengenai perkembangan Tangguh kepada Gubernur dan pejabat provinsi lainnya. Ada beberapa cara untuk mengatasi hal ini: pertama, mendirikan kantor hubungan pemerintah di Manokwari dengan staf lebih banyak berikut personel BP yang mengenal serta dapat bertemu dengan Gubernur dan pejabat provinsi penting lainnya secara lebih rutin; kedua, memastikan pejabat senior BP di Indonesia mengunjungi Manokwari secara berkala untuk memberi informasi kepada Gubernur, pimpinan DPRD dan MRP serta mendengar masukan mereka; ketiga, mengundang Gubernur dan pimpinan DPRD untuk mengunjungi Tangguh; dan keempat, menjadwalkan pertemuan antara Gubernur dan pejabat senior BP saat Gubernur berada di Jakarta.

Penting bagi Gubernur Papua Barat untuk mengetahui kegiatan Tangguh dan memberikan dukungannya jika memungkinkan. Tanpa pengetahuan menyeluruh, Gubernur tidak bisa mengomunikasikan program dan keberhasilan BP ke pihak lain baik di provinsi atau di Jakarta. Kapasitas ini penting karena sedikit sekali pejabat pemerintah Indonesia yang mengunjungi Papua dan karena pemerintah membatasi arus informasi dari Papua.

Mengingat Papua sangat berbeda dari Jawa dan bagian Indonesia lain, sedikit sekali pejabat senior yang memantau kegiatan tertentu di sana. Berita tentang Papua yang beredar di Jakarta umumnya negatif dan berkisar tentang serangan separatistis atau kekerasan yang dilakukan

aparap keamanan atau kesulitan yang dihadapi Freeport di tambang Grasbergnya. Selama beberapa tahun terakhir, segelintir berita tentang Tangguh umumnya menyoroti soal renegotiasi kontrak dengan China yang dianggap merugikan Indonesia. Artikel-artikel tersebut menyiratkan bahwa Tangguh merugikan Indonesia. Baru-baru ini tersiar berita mengenai apakah LNG Tangguh dari *Train 3* sebaiknya diperuntukkan bagi konsumen domestik, tema lain yang menyiratkan bahwa LNG Tangguh lebih menguntungkan negara lain daripada Indonesia.

Karena itu kekosongan berita dan tema-tema negatif tersebut harus ditanggapi dengan fakta-fakta mengenai manfaat Tangguh bagi Papua dan Indonesia. Fakta-fakta ini sebaiknya disampaikan melalui kegiatan peningkatan hubungan dengan pejabat senior pemerintah dan dengan meningkatkan kegiatan hubungan masyarakat dan media. Kedua fungsi itu dapat meningkatkan kesadaran bahwa Tangguh adalah aset nasional dan pemahaman terhadap program-program sosial Tangguh dan manfaatnya bagi penduduk asli Papua. Selain itu, BP juga harus mengundang menteri-menteri atau pejabat senior yang kewenangannya berkaitan dengan Tangguh untuk mengunjungi kilang LNG. Meski kunjungan tersebut membutuhkan waktu dan upaya BP, tidak ada cara lebih baik untuk meningkatkan kesadaran para pembuat kebijakan.

Tak hanya itu, BP harus lebih menampilkan diri sebagai pemimpin pengembangan masyarakat, baik di Papua atau di tingkat nasional. Semua orang dewasa di Papua dan Jakarta tahu bahwa Freeport mengalami masalah serius dalam hal keamanan dan hubungan masyarakat. Sangat sedikit yang tahu bahwa kondisi Tangguh amat berbeda dari Freeport. Hal ini tidak lantas berarti BP harus menyombongkan diri atas manfaat atau peningkatan tersebut; harus ada keseimbangan. BP adalah kontraktor dan pemerintah Indonesia adalah pemilik Proyek. Pemerintah harus diberi penghargaan yang sesuai atas partisipasinya di program-program yang berhasil. Tapi pengakuan, yang sebaiknya diarahkan terhadap Tangguh (sebagai proyek

Pemerintah) dan bukan BP, tetap merupakan hal penting. Banyak pejabat senior yang menyarankan hal ini.

Sebelumnya TIAP telah menyarankan agar BP menyediakan beasiswa atas nama Tangguh di UNIPA atau lembaga pendidikan tinggi lainnya di Papua. Paling tidak hal ini harus dilaksanakan.²³ BP juga harus meningkatkan dukungannya terhadap UNIPA melalui cara lain yang mengusung nama Tangguh, misalnya dengan mendukung program-program yang menggunakan mahasiswa atau fakultas UNIPA untuk proyek Tangguh, dan dengan mendukung infrastruktur fisik universitas itu. BP memang tidak membuat komitmen AMDAL untuk mendukung universitas di Papua yang jumlahnya sedikit, tapi BP tak boleh melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang paling berpeluang memberikan pendidikan tingkat tinggi bagi penduduk asli Papua dan menjelaskan bahwa Tangguh adalah bagian penting di dalamnya.

BP menyediakan dukungan teknis untuk rumah sakit baru yang modern di Bintuni, tapi tak ada hal yang menunjukkan keterlibatan BP atau Tangguh di sana. Dan BP, bersama PLN, sedang melaksanakan program elektrifikasi DAV dan Bintuni yang akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat setempat. Bila BP tak menyebarluaskan perannya di balik manfaat-manfaat tersebut, hanya sedikit orang yang tahu bahwa semua itu adalah dampak langsung dari Tangguh.

Cara lain agar BP dapat mempertahankan kegiatan hubungan masyarakatnya adalah melalui konsultasi publik intensif. BP telah menjalankan konsultasi tersebut dengan giat dan menyadari pentingnya dialog dengan semua pemangku kepentingan utama. Hal ini vital terutama bagi mereka di Teluk Bintuni yang terkena dampak langsung Tangguh. Di masa lalu BP telah

²³ Beasiswa ini akan menjadi tambahan bagi 970 beasiswa yang diberikan pemerintah Indonesia kepada penduduk asli Papua untuk mendapatkan pendidikan di sekolah ilmu pengetahuan dan teknis di seluruh Indonesia.

menggelar rapat pemangku kepentingan tahunan di Bintuni bersama pemerintah, masyarakat dan orang-orang yang berkepentingan. Pertemuan ini terpisah dan lebih luas dari ajang serupa yang digelar tim hubungan masyarakat di DAV untuk mensosialisasikan ICBS dan isu keamanan. BP tidak menggelar rapat seperti itu setahun belakangan ini. Hal ini mungkin disebabkan proposal ekspansi *Train 3* yang membutuhkan serangkaian rapat terbuka untuk menangani ekspansi tersebut.²⁴ Tapi isu ekspansi bisa jadi sangat berbeda dari isu yang diangkat dalam pertemuan pemangku kepentingan. Pertemuan pemangku kepentingan harus digelar di Bintuni setiap tahunnya terlepas dari pembahasan publik lain yang tengah berjalan. BP sebaiknya mempertimbangkan menggelar pertemuan umum lainnya di Manokwari. Dan semua orang yang tertarik pada proyek Tangguh harus diundang, termasuk mereka yang kritis terhadap Proyek.

Rekomendasi: Hubungan Pemerintah dan Publik

- 1. Kantor penghubung yang lebih kuat harus didirikan di Manokwari untuk mempertahankan hubungan dengan Gubernur, pejabat senior, DPRD dan MRP serta untuk memberikan informasi kepada mereka semua mengenai program dan isu di Tangguh. Selain itu pejabat senior BP Indonesia harus mengunjungi Manokwari ketika mengunjungi Tangguh; Gubernur dan pejabat senior DPRD harus diundang ke Tangguh; dan Gubernur harus diundang untuk bertemu pejabat senior BP ketika mengunjungi Jakarta.**
- 2. Tangguh harus memperkuat citranya di Teluk Bintuni, Papua dan di tingkat nasional. Melalui kerja sama dengan BPMigas, misalnya, BP dapat mengaitkan nama Tangguh dengan pemasangan listrik baru di Teluk Bintuni. Beasiswa yang diberikan untuk mahasiswa lokal di UNIPA dan universitas lain dapat dinamakan sebagai beasiswa Tangguh. BP atau Tangguh juga dapat menyumbangkan peralatan penting kepada rumah sakit yang baru dibangun, atau memberi manfaat lain yang dapat langsung diasosiasikan dengan Tangguh.**
- 3. Kegiatan urusan publik di Jakarta harus ditingkatkan. Taklimat informasi bagi media dan pejabat senior pemerintah harus digiatkan. Bila perlu, pejabat senior pemerintah sebaiknya diundang ke Tangguh.**

²⁴ Lihat XI di bawah.

4. **Setiap tahun BP harus menggelar pertemuan dengan seluruh pemangku kepentingan di Teluk Bintuni yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan pihak terkait lain. BP harus melaporkan program-program Tangguh dan meminta masukan dari semua pihak mengenai kinerja dan rencana BP di masa depan.**

VI. Program untuk DAV dan Teluk Bintuni

Selain mempekerjakan warga, Tangguh memberikan dampak positif kepada DAV dan Teluk Bintuni melalui Rencana Aksi Masyarakat (“CAP”) dan Program Sosial Terpadu (“ISP”). Keduanya diharuskan oleh AMDAL. Program-program ini dirancang dan dilaksanakan oleh Tim Hubungan Masyarakat BP yang hampir seluruhnya terdiri dari penduduk asli Papua dan membina hubungan baik dengan penduduk desa. ISP diperbarui tahun 2010 pada awal operasi untuk lebih fokus pada kesehatan, pendidikan, pengembangan mata pencaharian, hubungan masyarakat dan tata kelola pemerintahan. Selain ISP, CAP menyediakan sekitar \$30,000/tahun bagi tiap DAV guna mendanai prioritas mereka. Sebagai hasil dari struktur ini, program CAP memiliki dampak berikutnya yaitu mendorong tiap kampung untuk mengembangkan proses untuk mencapai suatu konsensus dalam prioritas pendanaan dan mencoba mengintegrasikan proses itu dengan program pendanaan pemerintah (misalnya Musrenbang). CAP pada dasarnya mendanai perbaikan infrastruktur kampung misalnya restorasi masjid, perbaikan dermaga dan jalan kampung, pengumpulan air hujan dan renovasi sekolah. CAP akan berakhir di tahun 2014. ISP yang sekarang akan berakhir di tahun 2015, tapi akan diperbarui dan dikaji tiap lima tahun sepanjang periode operasi.

a. Kesehatan

ISP memberikan manfaat kesehatan bagi semua DAV, terutama di bidang kesehatan, pendidikan dan mata pencaharian. Layanan kesehatan dan pendidikan telah meningkat dramatis dalam sepuluh tahun terakhir. Di bidang kesehatan, TIAP mencatat penurunan prevalensi malaria

di DAV serta penurunan berjangkitnya diare, yang merupakan penyebab utama kematian anak.²⁵ Penduduk kampung kini lebih nyaman dengan proses kelahiran dibantu bidan yang menyebabkan turunnya angka kematian ibu dan anak. Meski tingkat penggunaannya beragam, penduduk kampung juga makin sering menggunakan layanan medis dan obat-obatan modern termasuk imunisasi anak, yang tingkat penetrasinya telah mencapai 85%.²⁶ Pelayanan perawatan kesehatan di kampung-kampung kian meningkat berkat Unit Kesehatan Masyarakat Tangguh (“THCU”) BP yang kini dijalankan oleh yayasan lokal Yayasan Sosial Augustinus (“YSA”). Yayasan ini telah membangun fasilitas kesehatan dan melatih tenaga kesehatan di tiap kampung.

Beberapa DAV di pesisir selatan tahun ini mengalami kemunduran dalam hal prevalensi malaria. Hal ini bisa jadi disebabkan mobilisasi di DAV tersebut oleh perusahaan minyak asing lain. Kemunduran ini menunjukkan betapa lemahnya kemajuan yang diraih. BP tidak bisa mencegah perusahaan lain memasuki area tersebut, tapi BP akan dianggap bertanggung jawab atas akibat buruk tersebut. BP harus bekerja sama dengan YSA untuk menargetkan kampung-kampung yang mengalami peningkatan pekerja asing baik untuk malaria dan HIV.

Seperti disebutkan sebelumnya, perkembangan kesehatan utama di kabupaten adalah pembangunan dan pembukaan rumah sakit di Bintuni. Hal ini bukan dampak langsung dari ISP atau program BP lain. Panel mengunjungi rumah sakit tersebut (bersama Bupati) dan menemui dokter dan staf. Rumah sakit tersebut merupakan perkembangan drastis dalam hal fasilitas kesehatan di wilayah itu. Rumah sakit itu memiliki laboratorium modern, ruang gawat darurat dan peralatan medis canggih. Rumah sakit itu juga menarik perhatian personel kesehatan dari bagian lain Indonesia, termasuk sekelompok dokter magang muda yang akan praktik di sana.

²⁵ Lihat Laporan Ketujuh TIAP (Mar. 2009), hal. 34-35.

²⁶ Perubahan indikator kesejahteraan masyarakat dan indeks kepuasan dikompilasi dua tahun sekali dalam sensus yang dijalankan oleh UGM, dan diterbitkan sebagai “Dinamika Indikator Sosial Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni” [selanjutnya disebut sebagai sensus UGM]. Lihat hal. 29-30 di bawah.

Sebelumnya, rumah sakit terdekat berlokasi di Manokwari, setidaknya enam jam perjalanan menggunakan mobil dari Bintuni. BP menyediakan bantuan teknis untuk rumah sakit baru tersebut, tapi tak ada indikasi bahwa BP atau dana dari Tangguh berperan di sana. (Di Timika juga ada rumah sakit yang bagus dan keberadaannya diasosiasikan dengan Freeport.)

Keberhasilan rumah sakit itu sangat penting bagi kabupaten. Pendapatan dari Otonomi Khusus pada umumnya dan dari Tangguh pada khususnya dapat mewujudkan keberhasilan yang dimaksud. Tapi karena peran penting rumah sakit itu bagi kualitas pelayanan kesehatan di Teluk Bintuni, BP harus memiliki kepentingan atas rumah sakit tersebut dan, setelah berkonsultasi dengan Bupati, menyediakan dukungan sesuai target untuk meningkatkan kapasitas dan memastikan keberhasilan rumah sakit itu.²⁷

b. Pendidikan

Keberhasilan di bidang pendidikan dasar dan menengah umumnya adalah hasil kerja mitra BP, British Council, dan dinas pendidikan kabupaten. Angka melek baca-tulis di berbagai kampung terus meningkat, kini antara 65% hingga 94%. Tingkat kehadiran murid sekolah usia 6-12 meningkat dramatis meski tingkat ketidakhadiran murid di beberapa desa masih di atas 20%.²⁸ Tingkat kelulusan pelajar, bagi mereka yang hadir, sekitar 66% di tahun 2009, dan sekarang mencapai atau mendekati 100% selama dua tahun terakhir. Bupati mengakui peningkatan ini. Panel memberi ucapan selamat pada British Council dan pemerintah lokal atas perubahan yang cepat itu. Tapi beberapa orang yang ditanyai TIAP yakin hasil tersebut tidak dapat dipercaya; peningkatannya terlalu cepat dan melampaui angka kelulusan sekolah yang memiliki kualitas lebih baik di Jawa. Karena itulah TIAP mendorong BP untuk bekerja sama

²⁷ Sejauh ini, untuk mendukung rumah sakit yang baru, BP mulai memanfaatkan jasa pemeriksaan kesehatan (MCU) rumah sakit tersebut bagi karyawan BP dan kontraktor. Sampai September 2012, 27 karyawan telah melakukan MCU di Rumah Sakit Bintuni dan angka itu ditargetkan meningkat menjadi 70 karyawan per tahun.

²⁸ Sensus UGM, 2011.

dengan British Council untuk menciptakan tolok ukur baru dengan memonitor hasil ujian dan atau mengembangkan cara lain untuk mengevaluasi atau mengaudit integritas hasil tersebut.

Pada akhirnya, semua ini tidak akan berguna bagi murid bila manfaat prinsip program pendidikan itu adalah nilai ujian yang tinggi dan bukan “mendidik” siswa.²⁹

c. Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat

Selain manfaat kesehatan dan pendidikan, program mata pencaharian untuk DAV serta lapangan pekerjaan di Tangguh telah menaikkan tingkat pendapatan dan indikator kesejahteraan sosial lainnya secara substansial. UGM telah mengadakan survei sensus dua tahunan sekali terhadap semua DAV sejak tahun 2003 dan memasukkan sampel non DAV sejak 2009. Hal ini menghasilkan tolok ukur paling akurat dan objektif terkait perubahan demografi, ekonomi dan sosial di DAV serta perbandingannya terhadap kampung-kampung serupa yang tidak termasuk dalam program DAV. Sensus ini sangat penting bagi pengamat independen dan harus dilanjutkan tiap dua tahun selama masa operasi Tangguh. Sensus tahun 2011 menunjukkan peningkatan populasi serta pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi. Populasi di DAV yang sekarang berjumlah 13 kampung³⁰ meningkat 80% sejak 2003, termasuk peningkatan 11% sejak 2009 menjadi 11.251 jiwa. Sebanyak 60% populasi lokal adalah masyarakat adat Papua, dan lebih dari 25% imigran non-Papua. Di tahun 2003, sebanyak 83% penduduk DAVs adalah masyarakat asli Papua.

Pendapatan rumah tangga di DAV sejak 2003 meningkat rata-rata 186%, mulai dari pertumbuhan terendah yaitu 84% (Onar) hingga pertumbuhan tertinggi yaitu 274% (Otoweri).³¹ Sejak 2009, pendapatan rumah tangga terus meningkat signifikan di hampir semua DAV dengan

²⁹ Panel mencatat bahwa pertanyaan mengenai manfaat pendidikan dari hasil tes yang telah distandardisasi adalah isu yang muncul di berbagai belahan dunia.

³⁰ Beberapa DAV telah dibagi menjadi dua desa atau lebih sejak penetapan awal di tahun 2001.

³¹ Sensus pertama di tahun 2003 hanya mencakup tujuh DAV; RAV tidak diikutsertakan.

rata-rata 37%, mulai dari 17% hingga 111%. Menurut sensus, pendapatan di salah satu DAV di pesisir utara, Taroy, menurun 11% sejak 2009. (Hasil ini tentunya memasukkan migran yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi). Jumlah orang yang bekerja di sektor perikanan (703), pertanian (522) serta usaha kecil dan perdagangan (584) meningkat sejak 2009, dengan sektor perikanan berkontribusi 20% dari total pendapatan DAV, pertanian 10%, serta perdagangan dan usaha 26%. Kontributor terbesar bagi pendapatan DAV adalah pekerjaan di Tangguh yang berkontribusi 29% dari total pendapatan DAV.³²

Wanita di DAV umumnya mendapatkan manfaat dari kegiatan pemberdayaan wanita dan usaha mikro yang didukung oleh CAP. Wanita menanam buah-buahan dan sayur-sayuran, menjahit pakaian dan menghasilkan pendapatan. Pendapatan baru utama di luar DAV adalah penjualan buah-buahan, sayur-sayuran, udang dan ikan ke katering Tangguh dengan total 261 ton senilai Rp6 miliar (sekitar \$650,000) di tahun 2011. Juga ada delapan titik penyimpanan (stocking point) di berbagai kampung di Teluk Bintuni yang menyediakan suplai tersebut. Juga ada program-program yang dapat dijalankan dalam jangka panjang meski mereka mengandalkan Tangguh untuk memulainya. Setelah listrik tersedia di semua DAV³³, semua perdagangan dan usaha tersebut dapat dikembangkan untuk mencakup produksi dan penjualan produk olahan, terutama melalui kemitraan dengan pihak lain di Teluk Bintuni. Hal ini dapat terjadi bila rencana Bupati untuk mengembangkan sistem transportasi terpadu di Teluk Bintuni dapat terwujud. Rencana ini akan mendorong mobilisasi produk, layanan dan masyarakat. BP harus mencari cara untuk mendukung rencana Bupati sebagai upaya untuk mendapatkan rantai nilai tambahan di DAV. Program-program ini harus dilanjutkan dan dikembangkan ke semua DAV dan ke semua kampung di kabupaten jika memungkinkan.

³² Lihat Apendiks III.

³³ Lihat VI(e) di bawah.

Untuk memperkuat ISP dan CAP, Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni (“BBDF”) didirikan pada tahun 2007 untuk mengatasi ketidakseimbangan pengembangan antara masyarakat di pesisir utara dan selatan.³⁴ Ini merupakan kemitraan antara BP dan pemerintah setempat. Nota kesepahaman (“MOU”) yang mengatur hal tersebut akan kedaluwarsa pada tanggal 31 Desember 2012. Berbagai pencapaian, manfaat dan efektivitasnya serta berbagai kegiatan yang dapat dilakukan di masa depan kini sedang dikaji. BBDF memiliki keterbatasan di bidang pendanaan dan kapasitas institusional.

BBDF dirancang khusus untuk menangani kebutuhan fasilitas dan infrastruktur umum di desa-desa di pesisir utara. Bupati merupakan instrumen penting dalam manajemen BBDF. BBDF mendukung pembangunan beberapa infrastruktur umum baru di desa-desa di pesisir utara. Di tahun 2011, 41 proyek infrastruktur umum dan proyek noninfrastruktur telah dijalankan. Proyek-proyek tersebut mencakup ruang kelas, toilet umum, perpustakaan, perumahan guru, dan bangunan umum lain. Hingga Desember 2011, yayasan telah menerima total sumbangan Rp10,5 miliar (sekitar \$1,1 juta) dari BP Tangguh. Sekitar 81% dari pendanaan ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur umum.³⁵ Semua ini merupakan peningkatan yang bermanfaat, tapi masih banyak yang harus dikerjakan. BBDF belum mengurangi jurang infrastruktur antara kampung-kampung di pesisir utara dan selatan. Perbedaan ini tampak jelas dan menjadi sumber ketegangan dan ketidakpuasan di kalangan pemimpin masyarakat di pesisir utara. Ketegangan ini adalah dampak langsung dari Tangguh dan program-programnya; karena itu BP harus terus memprioritaskan penyelesaian ketidakseimbangan ini. Bupati telah menyerukan pembentukan dana perwalian untuk mendukung pembangunan di Teluk Bintuni. BP harus bekerja sama

³⁴ LARAP memandatkan pendirian yayasan lain yang dikenal sebagai Yayasan Dimaga, sebagai bentuk pengakuan khusus terhadap penduduk RAV yang menyediakan tanah bagi Tangguh. Yayasan telah didirikan dan mendapatkan dana, dan pembagian dana tengah berjalan. Tapi Dimaga tidak memberikan manfaat apa pun bagi DAV lain. Lihat Laporan TIAP Keenam (Mar. 2008), hal. 26.

³⁵ Laporan tahunan dan laporan keuangan Yayasan Pengembangan Teluk Bintuni tahun 2011.

dengan Bupati untuk memperbaharui dan menggiatkan kembali BBDF, termasuk mencari cara meningkatkan sumberdaya BBDF, bisa jadi melalui pembentukan dana perwalian dan memperpanjang masa tugasnya lima tahun lagi.

d. Kesejahteraan Masyarakat DAV

Selama lima tahun terakhir, sensus UGM juga memantau indikator kesejahteraan dan tingkat kepuasan. Sensus tersebut memuat indeks kesejahteraan yang terdiri dari tiga indeks: pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks gabungan meningkat dari 59,27 di tahun 2007 menjadi 66,04 di tahun 2009 menjadi 72,12 di tahun 2011.³⁶ Di tahun 2011, UGM menyimpulkan: “intervensi terkait pengolahan produk perikanan, penyediaan kemampuan dan pengawasan industri kecil, sistem pertanian modern, serta kesempatan untuk bekerja di Tangguh LNG dan mitranya berujung pada peningkatan kesejahteraan publik secara signifikan. Peningkatan standar kehidupan dapat dilihat secara objektif melalui indeks kesejahteraan.”³⁷

Sensus UGM juga mengukur tingkat kepuasan masyarakat mengenai kualitas fasilitas dan layanan sosial yang diberikan pemerintah. Dengan beberapa pengecualian, tingkat kepuasan terhadap infrastruktur fisik “cukup tinggi” dengan rata-rata 0,73.³⁸ Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan sosial (peningkatan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan keamanan) lebih rendah, hanya 0,65, dan beberapa kampung mencatatkan tingkat di kepuasan di bawah 0,50. ketika ditanya mengenai program yang dijalankan oleh Tangguh dan pemerintah, tingkat kepuasan rata-rata hanya 0,65. Karena itu, meski ada peningkatan dalam hal layanan sosial dan mata pencaharian, banyak penduduk desa tidak percaya hidup mereka lebih baik secara materiil

³⁶ Indikator kesehatan dan pendidikan yang dicantumkan dalam pengukuran ini mencakup: prevalensi malaria, turun ke 0,34% di 2011 dari 0,86% di 2009; imunisasi anak, naik dari 83,5% di 2009 ke 85% di 2011; lama bersekolah rata-rata, naik dari 4,8 tahun di 2009 ke 6,8 di 2011; pendaftaran murid sekolah dasar, naik dari 96,4% di 2009 ke 99,6%; dan melek aksara naik ke 83,9% dari 79,9% di 2009.

³⁷ Tabel sensus yang membandingkan hasil dari 2009 ke 2011 dimuat di Apendiks IV.

³⁸ Desa dengan indeks kepuasan terendah adalah Ekam dan Tomu (DAV di pesisir utara), dan Onar (RAV di pesisir selatan). UGM berkomentar: “beberapa program yang dijalankan di desa-desa tersebut tidak efektif. Fasilitas di ketiga desa itu kondisinya tampak lebih buruk.”

karena keberadaan Tangguh. Perlu ditandai bahwa tingkat kepuasan tertinggi dalam pengukuran ini terdapat di Kampung Weriagar dan Mogotira di pesisir utara.

e. Elektrifikasi DAV

Lebih penting lagi, semua DAV akan diterangi listrik dalam waktu dekat. Akhirnya BP dan perusahaan listrik negara PLN bergerak untuk menyediakan listrik di semua DAV dan Kota Bintuni. Hal ini dimungkinkan karena kebutuhan listrik Tangguh pada kapasitas penuh kini dapat diukur secara akurat, dan listrik yang tidak dibutuhkan untuk mengoperasikan kilang dapat digunakan bagi kebutuhan lain. Proyek Elektrifikasi Teluk Bintuni akan menggunakan daya sebesar 8MW dari Tangguh untuk menyediakan listrik kepada Kota Bintuni dan semua DAV sepanjang waktu. (RAV sudah mendapatkan listrik dari generator diesel selama enam jam per hari dan semua hunian serta usaha di DAV yang tersebar mendapatkan listrik dari diesel. Sebagian besar Kota Bintuni juga memiliki listrik dari diesel). Daya listrik ini dapat memungkinkan elektrifikasi wilayah lain di kabupaten ini. BP akan membangun fasilitas didalam pagar dan mengirim listrik ke pusat distribusi listrik milik PLN di luar. PLN akan memasang kabel dan jalur distribusi bawah laut ke semua DAV. Proyek ini didukung oleh Letjen (Purn.) Darmono, kepala UP4B.

Isu yang tersisa adalah harga listrik dan cara memastikan pembayaran.³⁹ BP dan PLN berpendapat bahwa listrik tidak boleh gratis. Proyek ini dapat segera diselesaikan karena sebagian besar kabel listriknya telah terpasang dan kabel bawah lainnya telah menumpuk di Bintuni. Setelah efektif, akan ada peningkatan infrastruktur signifikan bagi semua desa yang dilayaninya. Hal ini dapat mengubah opini orang-orang yang sebelumnya meragukan manfaat

³⁹ PLN kini memasok listrik ke 70% rumah tangga di Indonesia. Harga listrik disubsidi bagi semua pengguna kecil.

Tanggung terhadap wilayah tersebut.⁴⁰ Orang-orang di kabupaten harus tahu bahwa Tangguh memasok listrik ke wilayah Bintuni. BP harus bekerja sama dengan PLN untuk melaksanakan elektrifikasi tersebut secepat mungkin.

Rekomendasi: Program untuk DAVs dan Teluk Bintuni

- 1. BP harus bekerja sama dengan YSA untuk memfokuskan peningkatan kualitas perawatan malaria dan pencegahan HIV di kampung-kampung yang kedatangan banyak pekerja asing sebagai akibat kegiatan eksplorasi perusahaan lain di wilayah tersebut.**
- 2. BP harus berkonsultasi dengan Bupati untuk mencari tahu apakah ada peningkatan penting atau kebutuhan lain yang dapat disediakan Tangguh bagi rumah sakit Bintuni yang baru.**
- 3. BP harus bekerja sama dengan British Council untuk menciptakan tolok ukur, pengawasan atau metode evaluasi tambahan guna mengaudit integritas hasil ujian pendidikan di Teluk Bintuni.**
- 4. BP harus mencari peluang di bidang usaha mikro dan program pengadaan untuk menambah rantai nilai bagi bisnis di Teluk Bintuni, dan mendukung inisiatif Bupati dalam hal sistem transportasi terpadu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan peluang tersebut.**
- 5. Sensus DAV yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali harus dilanjutkan sepanjang operasi Tangguh dan, sebagai pembanding dan untuk mendapat gambaran lebih luas, harus terus mengikutsertakan sampel non-DAV di tiap sensus.**
- 6. BP harus bekerja sama dengan Bupati untuk meningkatkan dan menggiatkan Yayasan Pembangunan Teluk Bintuni (YPTB), bisa jadi dengan memberikan dana perwalian guna mendukung yayasan tersebut dan kebutuhan masyarakat adat lainnya.**
- 7. BP harus bekerja sama dengan PLN dan UP4B untuk memastikan proyek elektrifikasi Teluk Bintuni mencakup area seluas-luasnya dan dapat dilaksanakan secepatnya.**

⁴⁰ Ketua DPRD memfokuskan manfaat listrik bagi kabupaten dan seluruh Papua Barat. Dia mengeluhkan bahwa Tangguh terang-benderang, sedangkan Teluk Bintuni gelap gulita.

VII. Ketenagakerjaan dan Pelatihan Penduduk Asli Papua

Salah satu manfaat penting Tangguh bagi Papua adalah peluang kerja dan karier di fasilitas industri modern. Pemimpin Papua selalu mengutarakan peran penting yang dapat Tangguh mainkan dalam meningkatkan kemampuan dan keahlian pekerja Papua. Para pemimpin menargetkan bahwa penduduk asli Papua yang dilatih di Tangguh suatu hari nanti tak hanya mengoperasikan Tangguh, tapi juga menjadi manajer dan operator di berbagai fasilitas di seluruh dunia. BP menjunjung tinggi komitmen AMDAL-nya mengenai ketenagakerjaan dan pelatihan penduduk asli Papua. BP telah mendirikan Komite Pembangunan Papua, yang sebelumnya telah direkomendasikan oleh TIAP, yang menjadi perhatian manajemen dan secara aktif berupaya memenuhi target perekrutan dan retensi. Saat ini, 54% karyawan Tangguh, termasuk karyawan kontraktor, (dari total sekitar 3.400 pekerja) adalah penduduk asli Papua. Hal ini harus ditingkatkan menjadi 85% di tahun 2029, termasuk 100% karyawan yang tidak menduduki posisi pengawas dan posisi yang membutuhkan keterampilan. BP sudah melewati target rencana perekrutan karyawan Papua sepenuhnya yang membidik angka 46% di tahun 2012. Meski demikian, BP tidak boleh berpuas diri karena meningkatkan angka tersebut akan bertambah sulit.

Bahkan, beberapa pencapaian saat ini bisa terganggu oleh tinjauan manajemen risiko BP yang dapat berakibat pada pengurangan pekerja di kilang LNG yang dapat mencakup pekerja dari DAV. Manajemen risiko mengharuskan BP membatasi jumlah pekerja di kilang menjadi hanya mereka yang dibutuhkan untuk kegiatan lapangan. Penetapan People on Board (“POB”) ini melibatkan tinjauan kapasitas staf dan pekerja di semua level, struktur organisasi dan keefektifan sumber daya manusia dan efisiensi proses yang dapat meningkatkan risiko keselamatan. Jumlah POB berhubungan langsung dengan batas kapasitas evakuasi bagi pekerja lapangan dalam keadaan darurat. Beberapa pihak menganggap inisiatif ini bertujuan untuk

mengurangi tenaga kerja di lapangan meski bukan itu tujuan yang dimaksudkan oleh manajemen Tangguh. Sebagai akibatnya, muncul kecemasan bahwa inisiatif ini akan berdampak pada pekerja dari DAV yang sebagian besarnya memiliki tingkat keterampilan rendah. Jika benar demikian, tindakan ini akan memiliki dampak jangka pendek serius bagi persepsi masyarakat lokal terhadap Tangguh. BP harus mempertahankan semua karyawan dari DAV meski beberapa di antaranya harus bertugas di lokasi di luar wilayah kilang. Dan BP harus mengomunikasikan hal ini kepada semua pekerja yang berpeluang dipindahtugaskan. Jika tindakan pengurangan risiko ini mengharuskan BP untuk mengurangi jumlah pekerja lokal di fasilitas LNG, maka BP harus melakukan apa pun untuk memberikan pekerjaan di luar pagar bagi mereka, misalnya dengan memberikan layanan kepada Tangguh. Jika ada pemberhentian, seluruh pekerja yang diberhentikan harus mendapat pesangon dan semua pekerja asli Papua harus diutamakan bila ada kemungkinan untuk dipekerjakan kembali.

BP juga telah memenuhi atau melampaui rencananya untuk mempekerjakan warga Papua untuk posisi yang membutuhkan kemampuan teknis atau posisi pengawas. Saat ini 24% warga Papua menempati posisi yang membutuhkan kemampuan dan 16% menduduki posisi manajerial/pengawas. Hal ini merupakan peningkatan signifikan dibanding tahun 2009. Tapi perjalanan masih panjang: komitmen membutuhkan 78% pekerja Papua di posisi berkemampuan/terampil dan 33% di posisi supervisor di tahun 2029. Terus meningkatkan persentase itu setiap tahun adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi dan harus dipenuhi oleh BP. Saat ini BP menjalankan program perekrutan, retensi, dan karier yang efektif bagi pekerja Papua yang terampil tersebut. Enam angkatan teknisi dan operator asli Papua, total 136 staf, yang lulus dari perguruan tinggi dan sekolah teknis telah direkrut dalam tiga tahun terakhir. Semua operator dari gelombang pertama yang jumlahnya 24 orang telah dipromosikan dari

karyawan BP golongan K ke golongan J atau di atasnya dan 23 di antaranya kini menjabat sebagai supervisor atau pemimpin tim.

Sama pentingnya, BP mulai menerapkan target karyawan Papua kepada para kontraktornya. Lima gelombang magang dengan total 73 karyawan magang telah direkrut untuk enam bulan pelatihan kerja dan setelahnya mereka dapat dipekerjakan oleh kontraktor atau BP. Tiga puluh dua dari karyawan magang tersebut telah dipekerjakan oleh BP dan kontraktor-kontraktornya; sementara 17 karyawan magang di gelombang 5 masih menjalani pelatihan hingga Oktober 2012.

Ini hasil yang memuaskan. Program-program ini harus dilanjutkan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan manajemen. Panel menyaksikan beberapa pekerja terampil Papua bekerja di Ruang Kendali Utama dan bertemu dengan mayoritas pekerja. Panel terkesan dengan tekad, etos kerja dan kebanggaan mereka sebagai warga Papua. Mereka berkeinginan untuk menjalankan Tangguh suatu hari nanti. Sebagian besarnya mengikuti kursus bahasa Inggris yang ditawarkan oleh BP yang merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. BP harus terus menawarkan kursus-kursus itu dan mencoba mengakomodasi jadwal kerja panjang yang harus dipenuhi para teknisi dan spesialis tersebut.

Meski demikian, ada ambiguitas dan potensi konflik dalam jumlah tersebut karena ada beberapa cara berbeda-beda untuk mengategorikan seseorang sebagai penduduk asli Papua.⁴¹ Pekerja dapat dianggap sebagai penduduk asli Papua jika mereka menikahi warga Papua atau jika mereka lahir dan tinggal di Papua selama setidaknya 10 tahun. Memang persentase etnis Papua dalam tenaga kerja tidak meningkat sejak 2009. Ada kecemasan di kalangan pegawai Papua bahwa BP dan para kontraktornya merekrut non-etnis Papua, terutama untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis. Panel tidak akan terjebak kontroversi mengenai definisi

⁴¹ Lihat Laporan Pertama TIAP mengenai Operasi (Jan. 2011), hal. 20.

“penduduk asli Papua”, tapi karena nilai pentingnya bagi kawasan tersebut, Komite Pembangunan Papua BP dan para perekrut tenaga kerjanya harus berjuang untuk merekrut dan memajukan karier penduduk asli Papua sebanyak mungkin meski ini sangat sulit. Salah satu prioritas utama adalah penduduk asli Papua dari wilayah Teluk Bintuni. Masyarakat Bintuni⁴² harus mendapat kesempatan pertama dan, jika memungkinkan, ditawarkan pelatihan agar memenuhi persyaratan untuk lowongan yang tersedia. Harus ada upaya khusus untuk melatih karyawan Papua yang menunjukkan bakat dan motivasi untuk mencapai tingkat kemampuan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, banyak petugas keamanan yang dapat naik ke posisi yang lebih membutuhkan kemampuan dan lebih bertanggung jawab. Tindakan afirmatif ini akan meningkatkan dan mempertahankan karyawan Papua di Tangguh. Ke depannya, BP harus memfokuskan pelatihan teknis perekrutannya untuk etnis Papua dan mendorong kontraktor untuk melakukan hal serupa. Manfaatnya akan kecil atau tidak ada sama sekali bagi warga Papua jika keberhasilan perekrutan warga Papua dan program pelatihan dinodai dengan pertanyaan mengenai integritas dan akurasinya.

Rekomendasi: Ketenagakerjaan dan Pelatihan Penduduk Asli Papua

- 1. BP harus menyediakan pekerjaan di luar Tangguh untuk pekerja DAV yang direlokasi sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko. Pekerja yang diberhentikan harus diberikan pesangon dan penduduk asli Papua harus diutamakan untuk dipekerjakan kembali.**
- 2. Pelatihan bahasa Inggris bagi personel asli Papua di kilang LNG sangat berguna bagi penduduk asli Papua yang ingin maju. BP harus melanjutkan program ini dan mengatur kelas untuk mengakomodasi jadwal kerja panjang yang harus dipenuhi para teknisi tersebut.**
- 3. Perekrutan, retensi dan pengembangan etnis Papua harus tetap menjadi prioritas. BP harus menyediakan peluang dengan tingkat keterampilan lebih tinggi dan menawarkan pelatihan kepada karyawan Tangguh dari Papua dan Bintuni yang menunjukkan tekad untuk sukses di Tangguh.**

⁴² Tujuh suku yang berdiam di Teluk Bintuni adalah Wamesa, Irarutu, Soub, Sebyar, Kuri, Moskona, dan Simuri.

VIII. Tata Kelola dan Transparansi

TIAP selalu menyerukan pentingnya dukungan BP terhadap pemerintah dan masyarakat lokal yang lebih kuat. Seperti yang sebelumnya disampaikan Panel: “kebutuhan tak terhindarkan pemerintah untuk mengelola semua program sosial, manfaat jelas dari terjadinya hal ini sejak awal, dan pesatnya pertumbuhan pendapatan daerah yang akan dihasilkan Tangguh akan sangat membutuhkan tata kelola yang efektif.”⁴³ Seruan ini masih berlaku. Satu-satunya hal yang berubah adalah kebutuhannya yang kian mendesak. Kemajuan terjadi, tapi masih banyak yang harus dilakukan. BP, yang sampai saat ini masih merupakan investor asing terbesar di Papua Barat, harus memainkan peranan penting dalam membantu membangun tata kelola yang efektif di tingkat lokal dan provinsi.

Sejak 2009, mitra BP Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada (PSKK UGM) menangani program tata kelola di Bintuni dan pedesaan. UGM memfokuskan upayanya pada lima dinas di pemerintahan kabupaten (pendidikan dan olahraga; kesehatan; pertanian; kelautan dan perikanan; dan perencanaan dan pembangunan) dan bersama dengan DPRD. UGM memberi perhatian penuh pada perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah. UGM yakin bahwa pemerintah kabupaten telah meningkatkan prosedur anggaran dan perencanaan serta kapasitas sumber daya manusianya. UGM menyatakan mendapatkan hasil serupa di DPRD, terutama dalam hal anggaran dan fungsi staf. Tapi UGM mengakui bahwa meski dengan segala peningkatan ini, Teluk Bintuni masih berada di peringkat bawah dalam hal kapasitas dibandingkan pemerintah kabupaten lain.⁴⁴ Tidak seperti dua mitra

⁴³ Lihat Laporan Keenam TIAP (Mar. 2009), hal. 28, dan Laporan Pertama TIAP mengenai Operasi (Jan. 2011), hal. 29.

⁴⁴ Hal ini tidak mengejutkan mengingat kabupaten baru dibentuk di tahun 2004 dan pemilihan Bupati pertama baru dilaksanakan tahun 2006.

pemerintah terdahulu, upaya UGM sangat didukung oleh Bupati yang menyambut baik dukungan ini. Pembangunan kapasitas pemerintah Teluk Bintuni merupakan tantangan besar yang membutuhkan komitmen jangka panjang. Kegiatan UGM, atau dukungan sejenis lain, harus diteruskan. Program tata kelola UGM untuk pemerintah tingkat kabupaten akan berakhir pada bulan Maret 2013 dan saat ini sedang dilelang sesuai peraturan pemerintah Indonesia, sedangkan kontrak UGM untuk pemerintahan tingkat kecamatan dan desa masih berlaku sampai Januari 2014. TIAP sangat mendukung program ini baik dengan UGM atau mitra pelaksana yang baru.

Satu area yang harus difokuskan oleh UGM atau penerusnya adalah transparansi dan kebalikannya, korupsi (“fungsi pengendali”). Tata kelola yang baik dilandaskan pada pemerintahan yang transparan. Di area inilah UGM mengakui adanya masalah yang sulit diatasi tanpa masyarakat dan media yang kuat, sektor-sektor yang sayangnya tak ada di Teluk Bintuni. Meski demikian, kemajuan telah terjadi dan kemajuan lebih lanjut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan terhadap pendapatan daerah yang lebih besar. BP dapat berkontribusi dalam memenuhi tujuan-tujuan tersebut yang nantinya akan langsung tercermin pada Tangguh.

Papua Barat juga membutuhkan dukungan besar, terutama di bidang transparansi. BP telah menjadikan Teluk Bintuni dan kampung-kampungnya sebagai target utama bagi dukungan tata kelola. Hal ini dapat dimengerti. Meski demikian, Provinsi Papua Barat yang baru didirikan tahun 2004 membutuhkan perhatian lebih luas. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan besar atas program-program sosial Tangguh sebagai penerima dan memiliki kendali signifikan atas sebagian besar pendapatan Tangguh. Reputasi Tangguh akan dinilai, sebagiannya, atas hasil provinsi. Sejauh ini, terlepas dari rekomendasi TIAP terdahulu, BP belum melakukan banyak hal untuk meningkatkan kapasitas provinsi. Selama dua tahun terakhir, mitra BP Media Cipta Citra (“MCC”) telah menggelar beberapa seminar dan lokakarya mengenai transparansi industri

minyak dan gas untuk pejabat Papua Barat dan para pemangku kepentingan. Tapi meski dengan upaya-upaya ini, tingkat transparansi pengelolaan keuangan provinsi sangat rendah sampai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pun tidak bisa mengaudit pembukuan Papua Barat.

Panel yakin tingkat transparansi yang lebih tinggi di tingkat provinsi dan kabupaten dapat diwujudkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah berbuat banyak untuk meningkatkan transparansinya. Berdasarkan instruksi Presiden, Indonesia berhasil menjadi negara yang dinominasikan di Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (“EITI”). Kementerian Perekonomian telah membentuk tim transparansi untuk memastikan kepatuhan penuh di tahun 2013. (Tidak jelas apakah Indonesia akan mencapai kepatuhan penuh, meski alasan terbesarnya adalah kurangnya pelaporan perusahaan pertambangan, dan bukan perusahaan minyak dan gas). Laporan Indonesia ke EITI akan menjabarkan pendapatan berdasarkan proyek-proyek tertentu. Secara terpisah, Kementerian Keuangan mempublikasikan data yang merinci pendapatan tiap provinsi dan kabupaten dari proyek minyak dan gas tertentu. Data ini sangat bermanfaat untuk memahami arus pendapatan Papua Barat dan Teluk Bintuni, secara keseluruhan dan yang berasal dari Tangguh.

Meski demikian, alokasi dan penggunaan pendapatan ini sangat sulit untuk dilacak. BPK adalah lembaga independen yang ditugaskan pemerintah Indonesia untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas di semua tingkat pemerintahan. BPK memfokuskan perhatiannya pada lembaga pemerintah Indonesia (misalnya BPMigas) dan mengaudit perusahaan minyak dan gas untuk data *lifting* dan kepatuhan terhadap peraturan *cost recovery*. Hal ini sangat berguna untuk memastikan akuntabilitas di tingkat nasional. BPK juga hendak mengaudit semua provinsi dan kabupaten, tapi Papua Barat dan Teluk Bintuni memiliki tingkat transparansi yang rendah pada tahun 2010, hingga audit pada kedua pemerintahan tersebut menghasilkan status

“*disclaimer*” yang merupakan tingkat audit yang rendah. (Ada total 524 lokal audit. Sekitar 20% kabupaten mendapatkan status *disclaimer*; hanya 10% yang mendapatkan status tertinggi yaitu “*unqualified*”). Karena itulah tidak mungkin melacak pengeluaran atau aset kedua pemerintahan tersebut. Karena kurangnya akuntabilitas, BPK “tidak dapat menerapkan prosedur pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan.”⁴⁵

Transparansi dan akuntabilitas akan meningkat jika BPK dapat meninjau aset dan pengeluaran pemerintahan tersebut. Peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintahan tersebut secara dramatis akan dianggap impresif di seluruh Indonesia. Bupati dan Gubernur akan mendapatkan pujian atas keberhasilan itu. Inilah tujuan jangka panjang yang harus BP raih melalui mitra-mitranya. Hal ini akan berdampak baik pada Tangguh, sebagai model peningkatan tata kelola melalui pembangunan.

Hal ini mungkin tidak realistis dalam jangka pendek. Tapi dukungan terus-menerus untuk meningkatkan akuntabilitas adalah hal yang realistis dan harus ditingkatkan baik melalui UGM atau mitra lain. Selain itu BP juga harus menjajaki kemungkinan bekerja sama dengan Bank Dunia untuk melaksanakan analisis pengeluaran. Hal ini tidak akan menggantikan audit resmi dan akan membutuhkan kerja sama Gubernur dan Bupati (di pemerintahan mereka masing-masing). Tapi hal ini dapat menciptakan pembukuan yang lebih baik untuk anggaran-anggaran tersebut dan dapat memfokuskan perhatian pada penggunaan dana Otonomis Khusus dan pendapatan Tangguh.⁴⁶ BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia mengenai apakah analisis terhadap Papua Barat dan atau Teluk Bintuni dapat dilakukan mengingat rendahnya tingkat transparansi di atas (tentu saja analisis tersebut juga dapat mencakup kabupaten lain di Papua

⁴⁵ Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Teluk Bintuni Barat Untuk Tahun anggaran 2010. BPK, Indonesia

⁴⁶ Bank Dunia melakukan analisis tersebut untuk semua wilayah Papua di tahun 2005, bekerja sama dengan Gubernur Solossa. Lihat Laporan Kelima TIAP (Mar. 2007), hal. 34.

Barat). Jika Bank Dunia merasa hal tersebut dapat bermanfaat, BP harus membahasnya dengan Gubernur dan Bupati dan mendukung studi itu jika para pemimpin daerah memintanya. Meski Panel tidak menyarankan hal ini sebagai bagian dari kegiatan tahunan, 2012 adalah waktu yang tepat untuk mengumpulkan garis pangkal/baseline anggaran-anggaran tersebut, sebelum aliran pendapatan besar yang sebentar lagi akan masuk dari Tangguh.

Rekomendasi: Tata Kelola dan Transparansi

- 1. BP harus meningkatkan dukungannya terhadap pemerintah Provinsi Papua Barat yang lebih transparan dan akuntabel.**
- 2. BP harus berkonsultasi dengan Bank Dunia untuk menentukan apakah pembaruan mengenai Analisis Pengeluaran Papua, terutama untuk Papua Barat dan Teluk Bintuni dapat dilakukan dan bermanfaat.**

IX. Manajemen Pendapatan

Manajemen efektif dan akuntabilitas terkait pendapatan besar dari BP yang akan mengalir ke Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Teluk Bintuni akan terus menjadi salah satu fokus utama BP. Mengingat keterbatasan kapasitas pemerintah, dan kurangnya pengalaman menangani pendapatan dalam jumlah besar, pengelolaan yang buruk sangat mungkin terjadi. Dalam laporan sebelumnya TIAP berpendapat bahwa ini adalah isu yang harus diantisipasi di masa depan. Tapi sekaranglah masa depan itu. Tahun depan dan untuk pertama kalinya, pendapatan besar dari bagi hasil Tangguh akan mulai mengalir.⁴⁷

Pendapatan dari Tangguh hanyalah sebagian kecil dari apa yang ditransfer dari pemerintah Indonesia ke Papua Barat dan Teluk Bintuni yang harus dikelola di bawah Otonomi

⁴⁷ Proses pembagian pendapatan minyak dan gas diatur oleh formula yang kompleks. Provinsi dan kabupaten yang menghasilkan minyak dan gas menerima pendapatan sejak produksi dimulai tahun 2009 dari pajak dan bea cukai yang dibayarkan sebelum *cost recovery*. Teluk Bintuni mendapat sekitar \$3 juta dari pajak dan bea cukai di 2010 dan 2011. Tapi pendapatan utama berasal dari pembagian 70%/30% jatah pemerintah yang dicairkan setelah pajak dibayar dan sebagian besar biaya *cost recovery* diganti.

Khusus. Dari tahun 2001 hingga 2008, transfer ini dilakukan melalui Provinsi Papua dan terus meningkat secara dramatis. Total transfer meningkat dari Rp3,3 triliun di tahun 2001 menjadi sekitar Rp25,8 triliun di tahun 2009. Di FY 2010, Provinsi Papua Barat menerima sebesar Rp7,9 triliun (sekitar \$800 juta). Angka ini dari Dana Perimbangan yang mengendalikan transfer keuangan di bawah otonomi daerah ke semua provinsi, dan dari Dana Otsus, yang dikhususkan untuk provinsi-provinsi di Papua yang membutuhkan 80% untuk kesehatan dan pendidikan sedangkan sisanya untuk infrastruktur. Transfer ini, bahkan sebelum pendapatan dari Tangguh mulai mengalir, lebih tinggi per kapita dibandingkan 31 provinsi lain di Indonesia.⁴⁸

a. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Otonomi Khusus

Semua provinsi dan kecamatan/kota di sebuah provinsi menerima sebagian pendapatan dari proyek sumber daya alam di wilayah mereka. Tapi di bawah Otonomi Khusus, pendapatan dari proyek sumber daya alam di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memberikan provinsi penghasil dan kabupaten/kota dengan bagi hasil khusus yang telah ditambahkan. Pendapatan gas alam dan minyak, setelah dipotong pajak dan *cost recovery*, dibagi 70% untuk pemerintah provinsi dan 30% untuk pemerintah pusat.⁴⁹ Untuk gas alam, porsi 70% diberikan kepada provinsi, 30% (dari total pendapatan) dibagi berdasarkan formula tetap – 6% untuk provinsi, 12% untuk kabupaten penghasil, dan 12% untuk semua kabupaten/kota di provinsi tersebut. Sisa

⁴⁸ Dalam presentasinya ke TIAP tahun 2009, Bank Dunia memperkirakan total transfer di Bank Dunia pada saat ini mencapai sekitar Rp9 triliun (\$900 per orang). Lihat Laporan Ketujuh TIAP (Mar. 2009), hal. 17. Anggaran Teluk Bintuni di tahun 2010, yang sebagian besarnya berasal dari transfer keuangan dari pemerintah Indonesia, mencapai Rp757 miliar (termasuk awal bagi hasil dari minyak dan gas). Meski menerima dana sebesar itu, Papua dan Papua Barat masih merupakan dua provinsi termiskin di Indonesia dengan 32% populasinya di bawah garis kemiskinan dan Teluk Bintuni salah satu kabupaten termiskin di Papua Barat.

⁴⁹ Untuk gas alam, berlaku kebalikan bagi hasil provinsi yaitu 30%/70%; untuk minyak, bagi hasilnya adalah 15%/85%. Formula khusus ini berlaku 25 tahun setelah pemberlakuan Otonomi Khusus, sampai 2027, setelahnya bagi hasil kembali ke 50%.

40% dialokasikan untuk provinsi dan harus diimplementasikan melalui peraturan daerah khusus (perdasus) yang diterbitkan provinsi dan disetujui pemerintah Indonesia.⁵⁰

Perdasus ini belum diterbitkan dan telah menimbulkan perdebatan panjang. Draftnya kini tengah beredar. Penerbitan perdasus mengenai bagi hasil di Papua Barat bukanlah prioritas sebelum ada pendapatan Tangguh yang harus dibagi.⁵¹ Tapi kini pendapatan pajak dan cukai mulai mengalir dan sejak 2013, dana bagi hasil akan mengalirkan pendapatan besar ke provinsi dan Teluk Bintuni.⁵² Kementerian Keuangan (“MOF”) memperkirakan bagian pemerintah provinsi (70%) akan mencapai Rp237 miliar di tahun 2013 dan Rp577 miliar di tahun 2014 (sekitar \$60 juta). Pendapatan ini akan terus meningkat sampai *cost recovery* selesai, dan setelah itu pendapatan akan mulai datar. TIAP sebelumnya memperkirakan bahwa ini akan terjadi pada tahun 2017. Tingkat pendapatan sebenarnya tidak bisa diprediksi karena berkaitan dengan harga LNG yang berkaitan dengan harga minyak di masa depan. Untuk menggunakan pendapatan ini secara efektif dan untuk memastikan pendapatan itu benar-benar diberikan pemerintah Indonesia kepada Papua Barat, penerbitan dan pengesahan perdasus kini harus diprioritaskan.⁵³

b. Implementasi Peraturan (Perdasus)

Sayangnya, meski ada banyak perdebatan dan perkembangan berarti, masih banyak hal yang tidak jelas mengenai bagaimana pendapatan akan dialokasikan, atau untuk tujuan apa dana akan digunakan. Ini merupakan tugas pemerintah provinsi yang harus menerbitkan perdasus.

Gubernur bersama DPRD dan MRP Papua Barat memiliki tanggung jawab prinsip, tapi Bupati (dan Bupati lain di Papua Barat) juga harus memberi masukan dalam proses tersebut.

Kementerian Dalam Negeri dan pejabat senior lain mengisyaratkan bahwa pemerintah Indonesia

⁵⁰ Bagan yang menunjukkan arus pendapatan ini dicantumkan di Apendiks V.

⁵¹ Sampai 2008 tidak jelas bahwa Papua Barat berhak mendapat bagi hasil khusus sama seperti Provinsi Papua.

⁵² Sejak awal pajak dan bea cukai dari Tangguh merupakan bagian signifikan dari pendapatan total Teluk Bintuni.

⁵³ Pejabat senior pemerintah Indonesia menyatakan bahwa pendapatan-pendapatan tersebut tidak dapat didistribusikan sebelum perdasus diterbitkan.

akan menghormati konsensus pihak-pihak di Papua Barat, tapi tak dapat memaksakan solusi bagi provinsi tersebut. Panel berharap inilah yang akan terjadi. BP, melalui mitranya UGM, telah memberi masukan pada Bupati mengenai berbagai isu yang ada dan mulai menyarankan berbagai pendekatan alternatif. BP juga harus memfasilitasi pertemuan antara Kementerian Keuangan, Bupati, dan Ketua DPRD Papua Barat untuk menjelaskan soal isu transfer pendapatan. Hal ini sangat berguna dan harus dipertahankan. BP harus meningkatkan upaya ini sebagai prioritas program tata kelolanya. Mengingat keterbatasan kapasitas pihak-pihak terkait dalam menyusun legislasi/peraturan, BP dapat (melalui UGM atau mitra lain yang memenuhi syarat) menyarankan cara untuk mengatasi kebuntuan ini. Tanpa memihak atau mengasingkan pihak mana pun, BP juga harus mendukung Gubernur, DPRD di Manokwari dan MRP, dalam upaya mereka mencapai konsensus yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terkait secepatnya.

c. Klaim Kepemilikan Adat

Salah satu isu penting yang harus dibahas perdasus adalah klaim kepemilikan tanah adat terkait Tangguh. Panel bertemu dengan semua pihak yang harus menyetujui perdasus: Gubernur, DPRD dan MRP. Tanpa terkecuali, semuanya menekankan pentingnya menanggapi hak adat yang sah. Hal ini juga digarisbawahi oleh Bupati dan penduduk desa setempat. Pejabat senior pemerintah Indonesia juga menekankan pentingnya menanggapi klaim adat. LSM juga menggarisbawahi pentingnya menciptakan preseden praktik terbaik untuk klaim adat dalam proyek sumber daya alam. Meski banyak yang berharap BP akan menyediakan kompensasi ini, klaim adat tak dapat ditanggapi oleh BP yang merupakan kontraktor pemerintah Indonesia. Kompensasi adat sebesar Rp6 miliar dibayarkan kepada Bupati dan pemimpin adat di Teluk Bintuni pada tahun 2010, tapi semua pihak merasa bahwa pembayaran ini tidak memenuhi

seluruh klaim. Klaim adat terkait Tangguh dapat dan harus ditanggapi sebagai bagian dari perdasus yang mengatur bagi hasil dari Tangguh. Hak-hak ini berkaitan langsung dengan penggunaan tanah adat oleh Tangguh, dan pendapatan adalah hasil langsung produksi Tangguh.

Melalui mitra pelaksana, BP sebaiknya mendorong semua pihak untuk memasukkan persyaratan dalam perdasus bahwa klaim adat harus diselesaikan menggunakan pendapatan sumber daya alam dari Tangguh. Jika kesepakatan mengenai besarnya tak bisa dicapai, peluang ini harus dimanfaatkan untuk menentukan proses untuk menentukan klaim dan mekanisme pembayarannya.

d. Transparansi dalam Bagi Hasil

Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi bagian dari perdasus, karena keduanya harus ada di administrasi semua anggaran negara. Draf perdasus harus memuat satu kalimat “bab” mengenai akuntabilitas dan pelaporan. Draf itu menyatakan “pembukuan dan pelaporan laporan keuangan dari dana bagi hasil produksi minyak dan gas serta dana otonomi khusus dari Pemerintah Provinsi ke Pemerintah harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.” Mengingat rendahnya transparansi di Papua Barat dan Teluk Bintuni, serta ketidakmampuan BPK untuk mengaudit kedua pemerintahan tanpa status “*disclaimer*”, perdasus merupakan kesempatan langka untuk meningkatkan transparansi.

Sebagai bagian dari dukungannya terhadap upaya tata kelola, BP harus mendorong semua pihak untuk memasukkan persyaratan bahwa pendapatan dari Tangguh dan Otonomi Khusus harus diaudit dan dilaporkan oleh pemerintah Papua Barat dan pemerintah kabupaten penghasil pada tingkat yang dapat diaudit. BPK tentu akan membantu upaya ini. Selain fakta bahwa transparansi menjamin tata kelola yang baik, hal ini juga akan meningkatkan pemahaman mengenai manfaat yang diberikan Tangguh. Berbagai program dan proyek yang dimungkinkan

oleh pendapatan dari Tangguh harus diketahui oleh penduduk wilayah tersebut. Mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan akan makan waktu, tapi setidaknya langkah awal menuju transparansi dalam perdasus akan sangat bermanfaat. Akuntabilitas seperti demikian akan memastikan kontrol penggunaan pendapatan dan menghindari tata kelola yang buruk dan dampak buruk yang dapat muncul di pemerintahan yang mendadak mendapat pendapatan tambahan dari minyak dan gas.

Rekomendasi: Manajemen Pendapatan

- 1. BP harus membantu pemerintah provinsi seperti saat membantu pemerintah kabupaten dalam merancang perdasus yang mengakomodasi kepentingan semua pihak.**
- 2. BP harus mendorong semua pihak untuk memasukkan peraturan mengenai pembayaran klaim kepemilikan adat ke dalam perdasus.**
- 3. BP harus mendorong pihak-pihak terkait agar perdasus memuat langkah-langkah yang menjamin peningkatan transparansi dan akuntabilitas menyangkut dana yang dialokasikan.**

X. Lingkungan

TIAP tidak akan mengevaluasi kinerja lingkungan Tangguh secara detail. Hal ini masuk dalam cakupan kerja Panel Pemberi Pinjaman Eksternal, yang memantau kepatuhan AMDAL tahunan dan menerbitkan laporannya di situs web ADB. Tak hanya itu, Kementerian Lingkungan Hidup (“Ministry of Environment”) tiap tahun mengevaluasi kepatuhan Tangguh dan di tahun 2012 menerapkan program audit nasional yang baru (dikenal sebagai “Proper”). TIAP hanya akan mengevaluasi isu lingkungan hanya jika mereka mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat adat Teluk Bintuni dan reputasi BP.

Menteri Lingkungan Hidup (satu-satunya warga Papua di Kabinet) puas dengan kinerja lingkungan BP. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menciptakan sistem penilaian

kinerja lingkungan baru yang menerapkan lima warna sebagai penanda kinerja lingkungan (Proper), dan Menteri berharap Tangguh dapat meraih status hijau: kategori tahunan tertinggi. Meski demikian, setelah evaluasi dan pembahasan mendalam oleh pejabat KLH, Tangguh mendapat kategori kepatuhan biru untuk 2012, satu tingkat di bawah hijau karena satu kekurangan. BP harus 100% patuh untuk mencapai status hijau. Hal ini sangat disayangkan. Meski demikian, ini pertama kalinya Tangguh diaudit oleh KLH menggunakan sistem Proper. BP harus lebih berhati-hati di masa depan untuk menghindari kekurangan. Untuk meraih status emas, sebuah fasilitas harus mendapatkan status hijau selama tiga tahun berturut-turut. Inilah yang harus BP raih jika ingin menjadikan Tangguh sebagai model pembangunan global. Dengan perhatian dan kepatuhan yang telah BP jalankan, hal ini dapat diraih. Menteri lebih mencemaskan isu sosial, termasuk klaim adat dan perlunya masyarakat lokal memiliki rasa memiliki dan kemitraan dengan Tangguh. Dia juga menekankan perlunya memasukkan isu sosial/lingkungan dalam rencana pengembangan lanjutan.

Menariknya, tak ada LSM Papua yang menyoroti kinerja lingkungan Tangguh. LSM lingkungan nasional menyatakan kesulitan mendapatkan akses ke Papua dan kesulitan dana. Mereka umumnya cemas mengenai tingginya permintaan sumber daya alam di Papua, termasuk minyak dan gas, pertambangan, kehutanan dan kelapa sawit. Selain itu juga tak ada rencana holistik atau menyeluruh, ada konflik dan perubahan penggunaan tanah tanpa persetujuan masyarakat lokal. Mereka menyatakan bahwa tak ada model praktik terbaik untuk kompensasi adat. Mereka mencemaskan keadaan di sana jika gasnya sudah habis terkuras.

Semua itu adalah kecemasan yang masuk akal. BP bisa menanggapi dengan dua cara: pertama, salah satu fokus pengembangan kapasitas BP bagi pemerintah kabupaten adalah perencanaan tata ruang dan strategis. Selama hal ini berlanjut dan mencapai keberhasilan,

peluang terjadinya perkembangan yang menimbulkan konflik dan berbahaya dapat diperkecil; dan kedua, jika BP mendorong semua pihak untuk memasukkan kompensasi adat ke dalam rencana bagi hasil, hal itu akan menjadi preseden bagi semua proyek industri ekstraktif di provinsi tersebut di masa depan.

Kini setelah operasi berjalan, BP telah membangun Sistem Pengelolaan Lingkungan dan serangkaian Standar Prosedur Operasi Lingkungan (“SOP”). Sistem-sistem ini telah meraih sertifikasi ISO 14001 yang merupakan target BP. Panel melihat hal-hal yang mengindikasikan bahwa SOP-SOP tersebut akan dipatuhi dengan baik. Satu-satunya isu kepatuhan lingkungan di kilang adalah kelayakan sistem pengolahan air limbah yang kini telah diatasi. Sampai saat ini, tidak ada bukti dampak buruk dari operasi Tangguh terhadap lingkungan di sekitarnya, terutama dalam hal tambak ikan dan kepiting di Teluk Bintuni dan hutan bakau yang mengelilinginya. Tapi perlindungan terhadap berbagai sumber daya ini tak hanya harus dilakukan, melainkan juga didemonstrasikan. Karena itu berbagai sumber daya itu harus diuji dan dievaluasi secara berkelanjutan. BP, bersama mitranya UNIPA dan Institut Pertanian Bogor (“IPB”), menjalankan studi dasar perikanan terhadap sumber daya di Teluk Bintuni tahun 2004 dengan UNIPA dan melaksanakan penelitian lanjutan di tahun 2007 dan 2009 bersama IPB. Hasil pengujian-pengujian ini telah disampaikan kepada pejabat lokal dan pemerintah Indonesia. Melanjutkan penelitian-penelitian terhadap tambak ikan, udang dan kepiting dan kemungkinan terjadinya kontaminasi sepanjang operasi adalah hal yang penting walaupun hal ini melebihi persyaratan hukum yang dicantumkan dalam AMDAL.

Rekomendasi: Lingkungan

- 1. BP harus menargetkan status emas dalam penilaian lingkungan yang dilakukan oleh KLH.**

2. **Dukungan berkelanjutan untuk kegiatan perencanaan tata ruang kabupaten harus mencakup kepatuhan terhadap rencana penggunaan lahan yang melindungi lingkungan Teluk Bintuni.**
3. **Tambak ikan, udang dan kepiting di Teluk Bintuni serta potensi kontaminan harus dites dan dilaporkan secara berkala sepanjang Tangguh beroperasi.**

XI. Pengembangan Tangguh

BP dan mitranya telah mengumumkan rencana ekspansi/pengembangan Tangguh.

Pengembangan ini akan mencakup *train* ketiga untuk pengolahan LNG, dermaga baru untuk konstruksi dan kapal tanker LNG, platform lepas pantai dan sumur produksi baru, jaringan pipa bawah laut dan berbagai fasilitas penunjang lain seperti landasan pacu di perimeter Tangguh.

Pengembangan ini diumumkan di surat kabar di Jakarta dan Papua pada tanggal 12 Mei 2012.

Proyek ini akan menghadirkan setidaknya 7.000 pekerja tidak tetap ke Teluk Bintuni. Sebagai

bagian proses AMDAL, BP, BPMigas dan pejabat pemerintah lokal melakukan pertemuan

konsultasi publik di 17 lokasi mencakup 62 kampung dan kota di kabupaten yang terkena

dampak langsung dan di Manokwari. Konsultasi ini akan melibatkan masyarakat dari berbagai

suku di wilayah tersebut: Sebyar (pesisir utara), Sumuri dan Irarutu (pesisir selatan) dan Mbaham

(sebelah barat Teluk Berau). Proses ini akan menghasilkan AMDAL baru dengan kewajiban

sosial dan lingkungan yang baru pula. Proyek pengembangan ini merupakan momen yang tepat

bagi BP untuk menanggapi kecemasan masyarakat adat mengenai AMDAL yang ada sekarang

dan implementasinya, serta kekurangan atau ketidakseimbangan dalam program awal tersebut.

BP harus memanfaatkan momentum ini.

TIAP tidak akan berprasangka mengenai aspirasi atau kekhawatiran yang dikemukakan anggota masyarakat. Tapi salah satu area yang membutuhkan perhatian khusus adalah

perumahan dan infrastruktur di DAV di pesisir utara. Dalam sepuluh tahun terakhir, kegiatan

CAP dan inisiatif ISP di DAV tersebut telah meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan, menjalankan program-program pemberdayaan perempuan dan pengembangan mata pencaharian, serta menyediakan dana untuk peningkatan infrastruktur skala kecil (masjid, jalan setapak dan dermaga).⁵⁴ Meski demikian, tidak seperti RAV di pesisir selatan di mana perumahannya baru dibangun atau direnovasi sebagai bagian dari pemukiman kembali, perumahan dasar dan infrastruktur fundamental di desa-desa pesisir utara tidak berubah sama sekali. Apa pun yang dilakukan untuk memenuhi klaim penduduk adat di pesisir utara atau untuk menanggapi persepsi ketidakseimbangan manfaat sejauh ini, BP harus menanggapi tuntutan keadilan yang diajukan penduduk desa pesisir utara sebagai bagian pengembangan.

Hal kedua yang harus ditanggapi adalah perekrutan penduduk lokal. AMDAL versi awal mengharuskan BP menawarkan pekerjaan kepada tiap rumah tangga di tiap DAV. BP umumnya berhasil memenuhi persyaratan ini.⁵⁵ Kebutuhan terhadap pekerja akan berkurang selama pengembangan dibanding pada saat konstruksi dan keterampilan yang dibutuhkan akan menjadi lebih spesifik. Tak hanya itu, populasi DAV mengalami peningkatan dan sebagian besarnya bukan penduduk adat Papua. Meski demikian, BP harus kembali memprioritaskan warga Papua dari DAV dan penduduk Papua lokal lainnya untuk dipekerjakan. Jika jumlah pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan tidak mencukupi, BP harus melatih penduduk lokal Papua untuk pekerjaan berkemampuan rendah yang akan segera tersedia.

Masalah ketiga yang harus ditanggapi adalah bagaimana Tangguh dapat berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian di provinsi. Salah satu mekanisme jelas adalah menyediakan gas untuk listrik di Provinsi Papua Barat di luar DAV. Cara ini tentu membutuhkan kerja sama lebih luas dengan PLN, tapi tentu akan didukung oleh UP4B. Ini adalah target utama

⁵⁴ Lihat hal. 23-24 di atas.

⁵⁵ Lihat Laporan Ketujuh TIAP (Mar. 2009), hal. 61 dan Laporan Keenam TIAP (Mar. 2008), hal. 22.

Gubernur dan akan mendorong pembangunan ekonomi secara lebih menyeluruh di provinsi itu. Hal ini dapat dijalankan secara bertahap untuk menjangkau wilayah lebih luas di provinsi itu. Panel mendorong BP untuk mewujudkan visi ini dalam AMDAL yang baru, serta untuk menghindari konflik kewajiban seperti suplai gas untuk fasilitas petrokimia di Papua yang takkan banyak membantu pembangunan Papua Barat. Jika elektrifikasi dipromosikan secara tepat, semua orang Papua di provinsi itu akan tahu bahwa listrik yang menerangi rumah dan menjalankan usaha mereka berasal dari Tangguh. Ini akan memberikan keamanan tambahan bagi Tangguh karena pasokan listrik untuk warga bergantung pada kelancaran proyek Tangguh.

Rekomendasi: Pengembangan Tangguh

- 1. BP harus menanggapi ketidakseimbangan perumahan dan infrastruktur di DAV di pesisir utara dan selatan dalam AMDAL yang baru.**
- 2. BP harus berkomitmen menambah tenaga kerja asli Papua agar tiap keluarga Papua di DAV berpeluang memiliki anggota keluarga yang bekerja di BP atau mitranya. Jika jumlah pekerjaan yang tak membutuhkan keterampilan tidak cukup untuk memenuhi target ini selama pengembangan berjalan, penduduk asli Papua dari DAV harus dilatih untuk pekerjaan yang membutuhkan sedikit keterampilan.**
- 3. BP harus mempertimbangkan menggunakan gas Tangguh atau cadangan listrik untuk proyek elektrifikasi Papua Barat yang lebih luas sebagai tujuan jangka panjang.**

APENDIKS I

PETA PAPUA DAN PAPUA BARAT



Provinsi Papua Barat



APENDIKS II

PEMANGKU KEPENTINGAN YANG MEMBERI KONSULTASI PADA TIAP KONSULTASI DI TAHUN 2012 DITULIS DALAM CETAK TEBAL

Pejabat Pemerintah: Indonesia

Bahrullah Akbar, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan anggota tim

Rizal Asir, Urusan Eksternal, BPMIGAS

Ellan Biantoro, Urusan Eksternal, BPMIGAS

Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian*

Dr. M. Lobo Balia, Bidang Kewilayahan dan Lingkungan Hidup, Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral

H.E. Soemadi Brotodiningrat, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat^{*56}

Edi Butar-Butar, Hubungan Pers, Kementerian Pertahanan

N.T. Dammen, Kuasa Usaha, Kedutaan Indonesia di London *

**Letjen (Purn) Bambang Darmono, Kepala Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua
dan Papua Barat (UP4B) dan staf**

Tedjo Edmie, Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Ibnu Hadi, Konselor, Divisi Ekonomi, Kedutaan Indonesia di Washington, D.C.*

Hardiono, Wakil Ketua, BPMIGAS

Djoko Harsono, Penasihat Eksekutif, BPMIGAS

A. Edy Hermantoro, Direktur Pengawasan Usaha Hulu Minyak dan Gas, BPMIGAS

Dodi Hidayat, Wakil Ketua Bidang Operasi, BPMIGAS

R. Ir. Pos Marojahan Hutabarat, MA, Penasihat Ekonomi Menteri Pertahanan

Mohamad Ikhsan, Penasihat Senior, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sri Mulyani Indrawati, Ketua Bappenas*

Djohermansyah Johan, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Gellwynn Jusuf, Penasihat Sosial Ekonomi, Departemen Kelautan dan Perikanan

Kadajatmiko, Sekretaris, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Manuel Kaisepo, Menteri Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia *

Balthasar Kambuaya, Menteri Lingkungan Hidup

Ahmad Kamil, Deputi Urusan Dalam Negeri,

Dr. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian*

**Letnan Jenderal (TNI) Langgeng Sulistyono, Sekretaris Kementerian Koordinator Politik,
Hukum, dan Keamanan**

Bonnie Leonard, Kementerian Pertahanan

Nabiel Makarim, Menteri Lingkungan Hidup *

Andi Mallarangeng, Juru Bicara Presiden Yudhoyono*

Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan *

Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri*

**Agus Martowardojo, Menteri Keuangan dengan Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan**

Albert Matondang, Deputi Urusan Kebijakan Luar Negeri, Kementerian Koordinator Politik,
Hukum dan Keamanan

⁵⁶ * menandakan orang tersebut sudah tidak menduduki jabatan yang disebutkan di sini

Mohammad Ma'ruf, Menteri Dalam Negeri*

Agung Mulyana, Direktur, Departmen Dalam Negeri

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan*

Dr. Daeng Mochamad Nazier, Direktur Jenderal, Departmen Dalam Negeri

A. Sidick Nitikusuma, Penasihat Eksekutif Senior, BPMIGAS*

Freddy Numberi, Menteri Kelautan & Perikanan*

Freddy Numberi, Menteri Transportasi

Progo Nurdjaman, Sekretaris Jenderal, Departmen Dalam Negeri

I Made Pastika, Kapolda Bali, sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Papua*

Pramudjo, Direktur Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

R. Priyono, Ketua, BPMIGAS dan staf

Agus Purnomo, Asisten Khusus Menteri Lingkungan Hidup

Mayjen Setia Purwaka, Kepala Bagian Papua untuk Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan *

Yanuardi Rasudin, Deputi Menteri Negara Lingkungan Hidup

Lt. Gen. Agustadi Sasongko, Sekretaris Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Maj. Gen. Romulo Simbolon, Deputi Urusan Pertahanan, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Dr. Sodjuangon Situmorang, Direktur Jenderal Administrasi Publik, Departemen Dalam Negeri

Sjafrie Sjamsuddin, Wakil Menteri Pertahanan dan staf

Djoko Soemaryono, Sekretaris Jenderal Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Mardiasmo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

Dr. Heru Subiyantoro, Direktur Jenderal, Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan, Kementerian Keuangan

Widodo Adi Sucipto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan *

Dr. Ir. Sudarsono, Direktur Jenderal, Kementerian Dalam Negeri

H.E. Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan*

Rachmat Sudibjo, Ketua, BPMIGAS*

Yoga P. Suprpto, Manajer Proyek, Pertamina*

Benny P. Suryawinata, Wakil Asisten Urusan Luar Negeri Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan *

Dadi Susanto, Direktur Jenderal Strategi Keamanan, Kementerian Pertahanan

Budi Susilo, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan

Dr. I Made Suwandi, Kementerian Dalam Negeri

Djoko Suyanto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Iin Arifin Takhyhan, Direktur Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Alex Bambang Triatmojo, Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Budi Utomo, Deputi Bidang Keamanan Nasional, Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah

Kardaya Warnika, Ketua, BPMIGAS*

Ir. Rachmat Witoelar, Menteri Lingkungan Hidup

General Yudhi, Wakil Ketua, LEMHANAS*

Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan*

Jenderal (Purn) Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Indonesia
Purnomo Yusgiantoro, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral*
General Nurdin Zianal, Panglima Komando Daerah Militer, Papua*

Pejabat Pemerintah: Papua and Papua Barat

Abraham O. Atururi, Gubernur Papua Barat

Colonel Max D. Aer, Kepala Operasi Polda Papua*

Agus Alua, Ketua MRP dan anggota MRP*

Vitalis Yumte and Mrs. Anike Th. Sabami, Ketua Bersama, MRP dan anggota MRP

Decky Asmuruf, Sekretaris Gubernur Papua*

Dr. Yosef Auri, Ketua DPRD, Papua Barat

Frans Nikopas Awak, Camat Babo

Y. Berty Fernandez, Kantor Gubernur, Provinsi Papua

Deky Kawab, Wakil Bupati Bintuni

John Ibo, Presiden, Majelis Provinsi

Jimmy Demianus Ijje, Kedua, DPRD, Irian Jaya Barat and Anggota DPRD*

Ibrahim Kaatjong, Wakil Gubernur Papua Barat

drH. Costant Karma, Sekretaris Daerah, Papua

Pak Mandagan, Bupati Manokwari

Pak Mandowen, President Dewan Perwakilan Manokwari

Daud Mandown, Ketua DPRD, Irian Jaya Barat

Dr. Alfons Manibui, Bupati Bintuni dan Wakil Bupati

Mayjen TNI Hotma Marbun, Pangdam XVII Cendrawasih*

Ir, Melmambessy Moses, Kadis Pertambangan Provinsi Papua

Pak Paquil, Wakil Bupati Bintuni

Kolonel Molosan, Wakil Jenderal Simbolon (waktu Jenderal Simbolon menjabat sebagai
Komandan Regional TNI di Papua)

Bernard Nofuerbanana, ketua Adat Babo

Lt. Daniel Pakiding, Kepala Polisi Resor Babo

Captain Puryomo, Komandan Distrik Militer

ML Rumadas, Wakil Sementara Gubernur Irian Jaya Barat*

AKBP Halasan R. Situmeang Sik.MH, Kapolres Bintuni

Jaap Solossa, Gubernur Provinsi Papua*

Barnabas Suebu, Gubernur Provinsi Papua (dan Agus Sumule, Penasihat)*

Colonel Suarno, Direktur Keamanan Polda Papua*

Brig. Gen. Pol. Dody Sumantiawan, Kapolda Papua*

Irjen Pol. Drs. Bekto Suprpto, Kapolda, Papua*

Mayjen TNI M. Erwin Syafitri, Pangdam Cendrawasih, Papua

Irjen Pol Bikman L Tobing, Kapolda Papua

Frans A. Wospakrik, Wakil Ketua MRP

Irjen. Tommy Yacobus, Kapolda Papua

Mayjen Zamroni, Komandan daerah militer

Pejabat pemerintahan Kabupaten Bintuni

Ketua, Panitia Keamanan

Direktur Perencanaan untuk Manokwari, dan beberapa pejabat senior Manokwari lainnya

Pejabat Pemerintah: Amerika Serikat

Hans Antlöv, Penasihat Pemerintahan, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, Badan Amerika Serikat untuk Pembangunan Internasional (USAID)

Kristen F. Bauer, Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

H.E. Ralph Boyce, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia*

Karen Brooks, Direktur Urusan Negara Asia, Dewan Keamanan Nasional*

Christopher Camponovo, U Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Tenaga Kerja

Matthew Censer, Sekretaris Kedua, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Michele Censer, Asisten Pejabat Urusan Budaya, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Marc L. Desjardins, Konselor Urusan Politik, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Judith Edstrom, Ketua Partai/Direktur, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

Nadine Farouq, USAID

Faye Haselkorn, Penasihat Senior Pemerintahan Daerah, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

William A. Heidt, Konselor Ekonomi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

James M. Hope, Direktur, Kantor Pendidikan, USAID Indonesia

Richard Hough, Direktur Program, USAID

H.E. Cameron Hume, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia*

Karin Lang, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kantor Indonesia dan Timor Timur

Allan D. Langland, Wakil Direktur, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kantor Indonesia dan Timor Timur

Jon D. Lindborg, Wakil Direktur, USAID

H.E. Scot Marciel, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia

Walter North, Direktur Misi, USAID Indonesia

Kantor Urusan Kelautan Asia Tenggara (Brian McFeeters, Wakil Direktur; Donald Mattingley, Pejabat Untuk Indonesia)

Anne Patterson, USAID

Richard Pedler, Penasehat Komunikasi, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID *

Maria Pica, Penasihat Senior, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Tenaga Kerja

Fred Pollock, Direktur, Program Manajemen Sumber Daya Alam, USAID

Henry (“Hank”) M. Rector, Sekretaris Utama, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta
Edward Saeger

Geoffrey Swenson, Penasehat Operasi Lapangan, Program Dukungan Pemerintahan Daerah, USAID

Michael Uyehara, Pejabat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Kurt van der Walde, Pejabat Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

Shari Villarosa, Konselor Ekonomi, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta

John Wegge, Penasihat, Kantor Pemerintahan Daerah Terdesentralisasi, USAID

Holly Wise, USAID

Pejabat Pemerintah: Inggris

Deborah Clarke, Kedutaan Inggris Jakarta

H.E. Richard Gozney, Duta Besar Inggris untuk Indonesia*

H.E. Martin Hatfull, Duta Besar Inggris untuk Indonesia *

H.E. Charles Humphrey, Duta Besar Inggris untuk Indonesia *

Eleanor Kiloh, Sekretaris Kedua (Politik), Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Theresa O'Mahony, Sekretaris Kedua (Politik), Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Rebecca Razavi, Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Matthew Rous, Wakil Duta Besar, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta*

Nicolas Stewart, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta

Jonathan Temple, Kedutaan Besar Inggris di Washington, D.C.

Pejabat Pemerintah: Selandia Baru

H.E. Chris Elder, Duta Besar, Kedutaan Besar Selandia Baru Jakarta

Pejabat Pemerintah: China

Ma Jisheng, Konselor (Politik), Kedutaan Besar China di Jakarta

Tan Weiwen, Konselor (Ekonomi dan Komersial), Kedutaan Besar China di Jakarta

Xu Qiyi, Sekretaris Kedua (Ekonomi dan Komersial), Kedutaan Besar Cina di Jakarta

Penduduk Kawasan Kepala Burung Papua

Pak Biam, Camat Aranday, dan pemimpin desa Aranday

Marselinus Nanafesi, kepala desa Tomage

Jaelani Kabes, kepala desa Otoweri

Saleh Masipa, kepala desa Tanah Merah Baru

Mathias Dorisara, kepala desa Tofoi

Abdul Kadir Nabi, kepala desa Pera-pera

Soleman Solowat, sekretaris desa Pera-pera

A. Kadir Kosepa, kepala desa Tomu

Najib Alkatiri, pemimpin masyarakat desa Ekam

Otto Siwana, kepala daerah Sumuri

Adrianus Sorowat, staf dari daerah Weriagar

Salehudin Fimbay, staf dari daerah Tomu

I. Maneiri, Babo

Lulusan program magang dan pelatihan teknis untuk teknisi dan opator Papua BP (AB

Korano Mirino*, Eko Muhammad Taher Bauw*, Evert*, Haris Rumbaku*, Jonadap

Dominggus Stepanus Sapari*, Soleman Saflafo*, Steffi Edithya Florence Awom*)

Neles Tebay, Pendeta Katolik dari Keuskupan Jayapura
Pemimpin desa Babo
Pemimpin desa Tanah Merah
Pemimpin desa Tomu/Ekam
Penduduk Aranday
Penduduk Onar Baru
Penduduk Saengga
Penduduk Tanah Merah, termasuk panitia yang mengawasi dampak proyek Tangguh
Penduduk Taroy
Penduduk Tofoi
Penduduk Tomu/Ekam
Penduduk Weriar/Mogotira

Lembaga Swadaya Masyarakat

American Center for International Labor Solidarity (Timothy Ryan, Program Director, Kawasan Asia)
Amnesty International (Charles Brown; Lucia Withers)
Asia Foundation (Rudi Jueng, Asisten Direktur)
Pastor Paul P. Tan
Dr. M. Gemnafle
Bogor Institute of Agriculture (Syaiful Anwar, Sekretaris Program Studi, Fakultas Pertanian)
BPR Pt. Phidectama Jayapura (Bram Fonata, Direktur)
British Council (Wendy Lee, Penasihat Pengembangan Sosial, Toto Purwanto, Manajer Program, Manajemen Pendidikan & Tata Kelola)
Catholic Church (B.R. Edi)
Center for Human Rights at the RFK Memorial (Miriam Young; Abigail Abrash Walton)
Citizens International (John Wells)
CTRC (Bas van Helvoort, Direktur Eksekutif)
Conservation International (Barita Oloan Manullang, Spesialis Senior Konservasi Satwa; Jatna Supriatna, Direktur Eksekutif dan Wakil Presiden Regional untuk Indonesia; Yance de Fretes, Spesialis Satwa Papua; Iwan Wijayanto, Direktur Kemitraan)
Down to Earth (Liz Chidley)
ELSHAM (Aloysius Renwarin, Direktur; Ferry Marisan; Yery Baransano)
Earthwatch (Coralie Abbott, Manajer Program Korporat)
Eddy Ohoirwutun, Konsultan Adat
Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) (David Brown dan Ananda Idris)
FKIP Universitas Cenderawasih (Dr. Leo Sagisolo)
FOKKER (Yuven Ledang, Ketua Komite Pengarah, Septer Menufandu, Sekretaris Eksekutif, Budi Setiyauto, Sekretaris Eksekutif; Yul Chaidir, Komite Pengarah; Robert Mondosi, Komite Pengarah)
Human Rights Watch (Mike Jendrzejczyk)
Human Rights Commission of GKI (Obeth Rawar)
IBLF, The Prince of Wales International Business Leaders Forum (Lucy Amis, Manajer Program Bisnis dan Hak Asasi Manusia)
Indonesia Human Rights Network (Edmund McWilliams)

International Committee of the Red Cross (Frank Sieverts, Asisten Kepala Delegasi Regional, Amerika Utara)

International Crisis Group (Sidney Jones, Penasihat Senior; dan Cillian Nolan, Kathy Ward, Wakil Direktur ICG)

International Labor Organization (Tony Freeman)

ILO East Project (Khoirul Anam)

International Labor Rights Fund (Dr. Bama Athreya)

JATAM (Mining Advocacy Network) (Andrie Wijaya)

Komnas HAM Perwakilan Papua (Alberth Rumbekwan, Ketua Eksekutif; Jules Ongge)

LP3BH – Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (Christian Warinussi, Direktur; Simon Banondi; Andris Wabdaro)

LBH HAM Papua – Sorong (Sonratho J Marola, Direktur)

LP3AP – Jayapura (Selviana Sanggenafa, Direktur)

National Democratic Institute for International Affairs (Blair King)

National Human Rights Commission (Frits Ramandey, Ricky Kogoya)

The Nature Conservancy (Ian Dutton, Direktur untuk Indonesia; Titayanto Pieter, Manajer Kemitraan Konservasi, Arwandrija Rukma, Direktur Operasional)

Papua Presidium Council (Thom Beanal, Willy Mandowen)

Proyek Pesisir (Maurice Knight, Ketua Partai, Proyek Manajemen Sumber Daya Pesisir)

Pt. PPMA Jayapura (Edison Giay, Direktur)

Pusat Study HAM Universitas Islam Indonesia (Suparman Marzuki, Direktur)

PusHam (Pusat Study HAM Universitas Negeri Cenderawasih) (Frans Reumi, Direktur)

SKP Sekretariat untuk Keadilan dan Perdamaian (Budi Hermawan, Koordinator) (Budi Hermawan, Koordinator)

TAPOL, The Indonesia Human Rights Campaign (Danny Bates)

UK Overseas Development Institute (Michael Warner)

US-ASEAN Council (John Phipps)

WALHI (Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif)

West Papua Association UK (Linda Kaucher)

Wildlife Conservation Society (Dr. Nicholas W. Brickley, Manajer Program)

World Wildlife Fund (Heike Mainhardt; Benja Victor Mambai; Clive Wicks)

YPMD Yayasan Pengembangan Masyarakat (Decky Rumaropen, Direktur)

Yayasan Satu Nama (Sigit Wahyudi, Koordinator Lapangan)

Sektor Swasta

AGI Security & Business Intelligence (Don Greenlees, Direktur, Riset dan Analisis)

Asian Development Bank (Edgar Cua, Direktur untuk Indonesia; Perwakilan Indonesia: Adiwarman Idris, Jean-marie Lacombe, Ayun Sundari, Noraya Soewarno)

Chemonics (Jonathan Simon, Manajer Senior)

Citigroup International (Michael Zink, Pejabat Citigroup untuk Indonesia)

Douglas Ramage, Bower Asia Group

Halliburton KBR (John G. Baguley, Manajer Project)

Indochina Capital (Rick Mayo-Smith, Partner Pendiri)

International Finance Corporation (Juanita Darmono, Manajer Program, Hubungan

Migas/Tambang*; Carl Dagenhart, Manajer Program, Hendro Hadianono, Pejabat Pengembangan Bisnis*)

ISIS Asset Management (Robert Barrington)
JGC Corporation (Tadashi Asanabe, Direktur Proyek)
JMSB-KMSB-SIME Consortium (Ron E. Hogan, Direktur Proyek)
Kiani Kertas (Jend. TNI (Pur.) Luhut Panjaitan MPA, Presiden Komisaris)
KJP (Okinari, Manajer Proyek)
Perform Project, RTI International (Ben Witjes, Penasihat Senior Kawasan PDPP)
YIPD/CLGI (Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah) (LeRoy Hollenbeck, Direktur Pengembangan Bisnis; Alit Merthayasa, Direktur Eksekutif; Endi Rukmo)

Lembaga Internasional

United Nations Development Programme (Bo Asplund, Perwakilan UNDP di Indonesia; Shahrokh Mohammadi, Deputi Perwakilan; Gwi-Yeop Son, Deputi Senior Perwakilan; Kishan Koday, Pejabat Program-Unit Lingkungan; Abdurrachman Syebubakar, Pejabat Program-Unit Inisiatif Lingkungan; Dra. Judith P.C. Simbara MSi, Manajer Proyek Nasional, Capacity 2015; Reintje Kawengian, Spesialis Pengembangan Institusional, Capacity 2015)
World Bank in Indonesia (Bert Hofman, Kepala Ekonom; Andrew Steer, Direktur Negara, Indonesia; Scott Guggenheim, Kepala Peneliti Sosial; Wolfgang Fengler, Ekonom Senior; Douglas Ramage, Spesialis Tata Kelola Senior)
World Bank Support Office for Eastern Indonesia (Petarca Karetji, Koordinator; Richard Manning)

Institusi Akademik di Papua and Papua Barat

UNIPA DR. Suriel Mofu, Rektor (Yan Piet Karafir, Rektor*; Frans Wanggai, Rektor*; Fenny Ismoyo, Wakil Rektor; Merlyn Lekitoo, Wakil Rektor; Benny Tanujaya, Adelhard B. Rehiara; Hastowow Resiyanto; Angglin P. ST; and Fakultas-Fakultas)
University of Cenderwasih (Frans A. Wospakrik, Rektor, dan Fakultas-Fakultas; dan B. Kambuaya, Rektor Menjabat)
Universitas Gadjah Mada, Profesor Muhajir Darwin, Kepala PSKK dan timUGM

Individu

John Aglionby, Koresponden, Financial Times
Herbert Behrstock, Konsultan Pengembangan Internasional
Laksamana Dennis Blair (Purn.) Angkatan Laut Amerika Serikat, Ketua Komisi Indonesia, Pusat Tindakan Pencegahan, Dewan Hubungan Luar Negeri Dr. Jonah Blank, Professional Staff Member, U.S. Senate Committee on Foreign Relations
Professor Michael M. Cernea, Penasihat BP mengenai Pemukiman Kembali Tanah Merah
Hugh Dowson
Bennett Freeman, Principal, Strategi Investasi Berkelanjutan
Benny Giaiy
Brigham Montrose Golden
Bara Hasibuan, Intern, Dewan Perwakilan A.S., Komite Hubungan Internasional
Ayse Kudat, Penasihat BP mengenai Pemukiman Kembali Tanah Merah
Ismira Lutfia, Reporter, Jakarta Globe
Duta Besar Edward Masters, Ketua, Perkumpulan A.S.-Indonesia
John McBeth, Penulis Senior, The Straits Times
Gabrielle K. McDonald, Penasihat Hak Asasi Manusia untuk Freeport McMoRan

Octovianus Mote

Gerry Owens, Panel Pemberi Pinjaman Eksternal

David Phillips, Anggota Senior dan Wakil Direktur dari Pusat Tindakan Pencegahan, Dewan Hubungan Luar Negeri

Ed Pressman

Uskup Agung Eddy Resariyanto

Uskup Agung Alexander R.

Pendeta Herman Saud

Duta Besar Sabam Siagian

Barnabus Suebu, Mantan Gubernur Papua

Gare Smith, Foley Hoag

Agoeng Wijaya, Koran Tempo

Arintoko Utomo, Panel Pemberi Pinjaman Eksternal

Reverend Socrates Yoman, Presiden Perkumpulan Gereja Baptis

APENDIKS III

HASIL SENSUS UGM 201: PENDAPATAN RUMAH TANGGA DAV

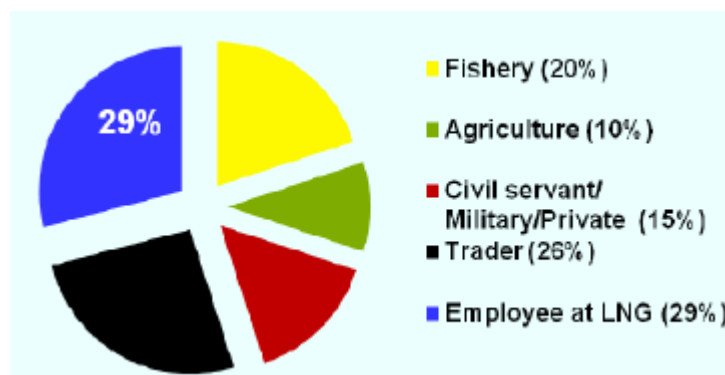
Pertumbuhan Pendapatan Rumah Tangga Berdasarkan Kampung

Village	Household's Income (IDR/month)			% increase from 2003 to 2011
	2003	2009	2011	
Weriagar	1,184,000	3,218,810	3,760,179	218%
Mogotira	1,569,000	2,209,815	3,416,493	118%
Tomu	1,300,000	2,522,468	3,411,977	162%
Ekam	1,340,000	2,442,581	3,739,259	179%
Taroy	1,052,000	2,808,784	2,501,467	138%
Sebyar Rejosari	NA	2,601,348	3,334,551	28%*
Irarutu 3	NA	2,785,712	4,002,807	44%*
Tofoi	1,383,000	2,507,858	4,298,686	211%
Tanah Merah	1,268,900	2,834,975	3,622,219	181%
Saengga	1,526,000	2,555,117	3,519,952	131%
Onar	1,268,900	1,295,850	2,331,642	84%
Otoweri	1,158,000	2,046,667	4,332,845	274%
Tomage	NA	2,292,059	2,863,322	25%*

Source: Social economical survey, 2003, 2009 and 2011

*As the survey was not conduct in 2003 for certain villages, the percentage increase shown in the table is comparing between 2009 and 2011

Pendapatan Rumah Tangga berdasarkan Sektor (IDR)



APENDIKS IV

HASIL SENSUS UGM 2011: INDEKS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT⁵⁷

Rata-Rata Pendapatan Rumah Tangga Per Bulan Berdasarkan Kampung, 2009 dan 2011

Villages	Fisheries				Agriculture				Trade and Small Industries			
	2009		2011		2009		2011		2009		2011	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Weriagar	2,167,113	10.8	3,345,932	10.9	546,471	5.8	1,516,509	10.1	1,125,000	5.4	1,254,104	5.1
Mogotira	1,200,391	6.0	3,160,795	10.3	614,706	6.5	1,125,550	7.5	900,000	4.3	1,162,500	4.7
Tomu	2,396,739	11.9	2,435,043	7.9	525,714	5.5	1,176,569	7.8	1,366,667	6.6	1,242,917	5.1
Ekam	2,073,478	10.3	2,459,208	8.0	488,885	5.1	1,020,213	6.8	2,466,667	11.9	3,360,000	13.7
Taroy	1,968,413	9.8	3,610,844	11.7	1,323,810	13.9	2,667,262	17.8	2,033,333	9.8	1,945,000	7.9
Sebyar Rejosari	1,156,905	5.7	659,000	2.1	807,363	8.5	2,006,097	13.4	1,896,552	9.2	2,904,314	11.9
Irarutu 3	1,505,556	7.5	3,200,219	10.4	549,091	5.8	803,704	5.3	1,483,654	7.2	2,423,700	9.9
Tofoi	1,305,556	6.5	1,920,000	6.2	1,597,333	16.8	905,180	6.0	1,860,156	9.0	1,353,683	5.5
Tanah Merah Baru	1,004,417	5.0	939,071	3.1	131,417	1.4	918,726	6.1	2,476,000	11.9	3,554,000	14.5
Saengga	1,812,333	9.0	2,374,156	7.7	861,750	9.1	693,917	4.6	2,083,333	10.1	1,500,000	6.1
Onar	928,583	4.6	2,156,301	7.0	1,253,583	13.2	638,243	4.2	1,966,667	9.5	1,441,250	5.9
Otoweri	1,713,750	8.5	3,653,625	11.5	-	-	741,696	4.5	1,066,667	5.1	1,118,750	4.6
Tomage	900,000	4.5	821,078	2.7	800,000	8.4	811,359	5.4	-	-	1,235,560	5.0
Total	20,133,234	100.0	30,735,273	100.0	9,500,127	100.0	15,025,026	100.0	20,724,696	100.0	24,495,778	100.0

⁵⁷ "Dinamika Kondisi Sosial Ekonomi di Kabupaten Teluk Bintuni, 2009-2011," Universitas Gadjah Mada.

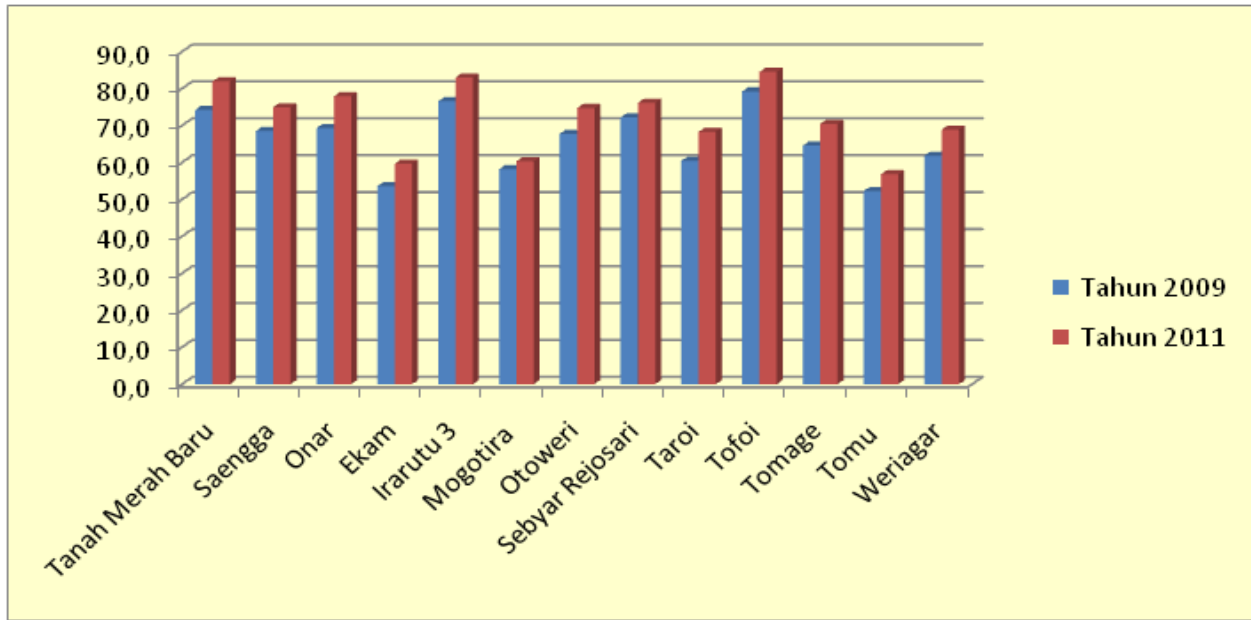
Indeks Perekonomian, Pendidikan dan Kesehatan, 2009 – 2011

Villages	Economic Indices		Education Indices		Health Indices	
	2009	2011	2009	2011	2009	2011
Tanah Merah Baru	64.2	72.4	71.3	85.1	87.0	88.3
Saengga	55.2	60.1	68.1	83.1	82.3	81.6
Onar	59.1	69.2	69.6	80.1	79.3	84.6
Ekam	37.0	42.5	54.5	68.3	69.3	68.3
Irarutu 3	62.4	71.8	79.2	91.1	88.0	86.1
Mogotira	37.7	40.8	56.0	67.9	80.8	72.3
Otoweri	55.5	70.2	66.4	74.6	81.4	79.3
Sebyar Rejosari	66.4	69.0	64.0	81.3	86.1	78.3
Taroi	49.1	55.1	58.1	75.8	74.1	74.0
Tofoi	68.8	76.3	78.5	89.0	90.3	88.2
Tomage	51.5	58.3	60.2	72.4	82.1	80.5
Tomu	38.6	41.3	47.1	58.0	71.0	71.1
Weriagar	51.3	58.5	54.5	67.2	79.7	81.0
Average	53.6	60.4	63.6	76.4	80.9	79.5
Level of changes	6.8		12.8		-1.4	

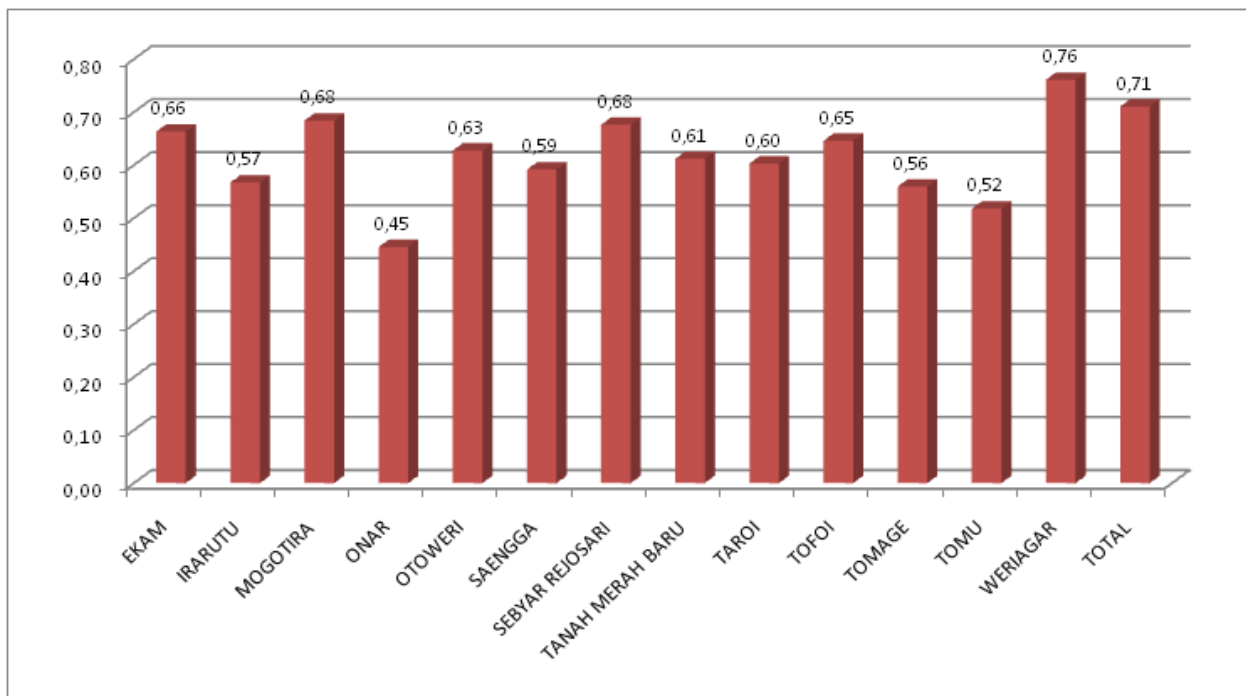
Perkembangan Indeks Kesejahteraan Kampung, 2009 dan 2011

Indeks Kesejahteraan:

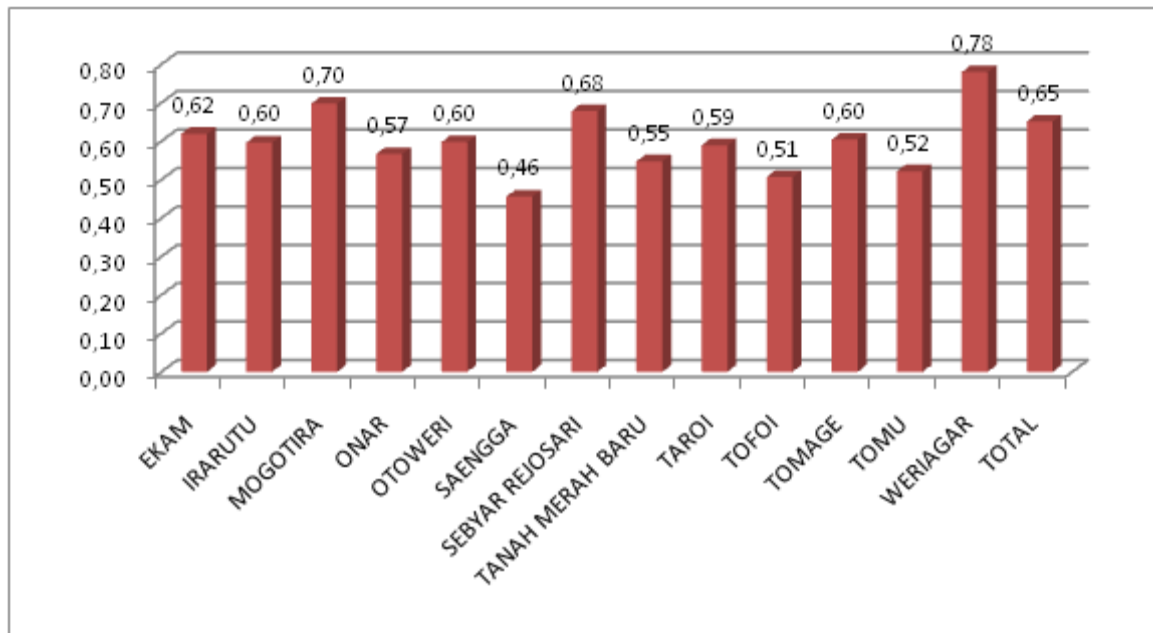
- 2007 = 59.27
- 2009 = 66.04
- 2011 = 72.12



Indeks Tata Kelola



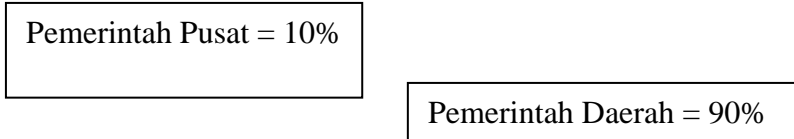
Indeks Kesejahteraan Subjektif



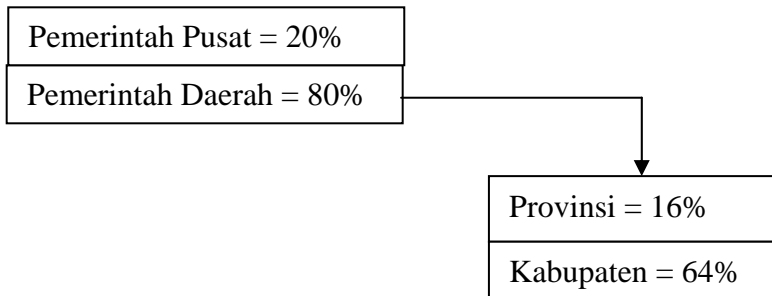
APENDIKS V

BAGI HASIL UNTUK GAS ALAM PRODUKSI PAPUA BARAT

Pajak Tanah dan Bangunan



Bea Cukai



Pendapatan Sumber Daya Alam

